

Katalog : 3102017.73

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2023

Volume 7, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Katalog : 3102017.73

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2023

Volume 7, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023 Volume 7, 2024

Katalog : 3102017.73
Nomor Publikasi : 73000.24033
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv+67 halaman

Penyusun Naskah/Penyunting/Pembuat Kover :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dicetak oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

TIM PENYUSUN

**INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2023
Volume 7, 2024**

Pengarah
Aryanto

Penanggungjawab
Suri Handayani

Penyunting
Wuri Wahyuni

Penulis
Muhammad Ilham Mubarok

Desain Sampul dan Tata Letak
Muhammad Ilham Mubarok

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dapat juga dilihat komponen capaian pembangunan manusia menurut jenis kelamin.

Kami mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Makassar, Juli 2024



Aryanto

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan

Daftar Isi

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023
Volume 7, 2024

v	: KATA PENGANTAR
vii	: DAFTAR ISI
ix	: DAFTAR TABEL
xi	: DAFTAR GAMBAR
xiii	: DAFTAR LAMPIRAN
1	: BAB I
	: PENDAHULUAN
3	: 1.1. Konsep Pembangunan Manusia
6	: 1.2. Konsep Pembangunan Gender
7	: 1.3. Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG)
7	: 1.4. Variabel dalam Indeks Pembangunan Gender
19	: BAB II
	: GENDER DALAM RANAH MASYARAKAT
22	: 2.1. Kependudukan
24	: 2.2. Bidang Kesehatan
26	: 2.3. Bidang Pendidikan
30	: 2.4. Ketenagakerjaan
35	: BAB III
	: CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER SULAWESI SELATAN
37	: 3.1. Pembangunan Gender di Sulawesi Selatan
42	: 3.2. Posisi IPG Sulawesi Selatan di Indonesia
44	: 3.3. Pembangunan Gender di Kabupaten/Kota
47	: BAB IV
	: PEMBERDAYAAN GENDER SULAWESI SELATAN
49	: 4.1. Konsep Pemberdayaan Gender
50	: 4.2. IDG Sulawesi Selatan
55	: 4.3. Capaian Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota
59	: DAFTAR PUSTAKA
63	: LAMPIRAN

Daftar Tabel

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023 Volume 7, 2024

- 7 : Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IPG
- 9 : Tabel 1.2 Konversi Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
- 9 : Tabel 1.3 Konversi Partisipasi Sekolah
- 12 : Tabel 1.4 Komoditas Penyumbang Penghitungan Paritas Daya Beli
- 22 : Tabel 2.1 Statistik Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2023
- 25 : Tabel 2.2 Indikator Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 27 : Tabel 2.3 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan Menurut Daerah dan Jenis Kelamin (persen), 2023
- 28 : Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni Sulawesi Selatan Menurut Daerah dan Jenis Kelamin (persen), 2023
- 29 : Tabel 2.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca Menulis dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 43 : Tabel 3.1 UHH, HLS, RLS, dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Sulampua, 2023
- 50 : Tabel 4.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IDG
- 53 : Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, Desember 2023
- 53 : Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, Desember 2023

Daftar Gambar

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023 Volume 7, 2024

- 3 : Gambar 1.1 *Framework* Pembangunan
- 11 : Gambar 1.2 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM
- 14 : Gambar 1.3 Alur Perhitungan Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan
- 14 : Gambar 1.4 Daftar Paket Komoditi Makanan dan NonMakanan yang dipergunakan dalam Perhitungan PPP untuk IPM Metode Baru
- 17 : Gambar 1.5 Rumus Perhitungan IPM Metode Baru
- 18 : Gambar 1.6 Gambaran Perhitungan IPM
- 21 : Gambar 2.1 Peta Sulawesi Selatan
- 23 : Gambar 2.2 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan, 2023
- 30 : Gambar 2.3 Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2023
- 31 : Gambar 2.4 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2019–2023
- 32 : Gambar 2.5 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), 2019–2023
- 33 : Gambar 2.6 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (persen), 2023
- 34 : Gambar 2.7 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2023
- 37 : Gambar 3.1 Perkembangan IPG, IPM Laki-Laki, dan IPM Perempuan di Sulawesi Selatan, 2020–2023
- 38 : Gambar 3.2 Perkembangan UHH Laki-laki, UHH Perempuan, dan Total UHH di Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023
- 40 : Gambar 3.3 Perkembangan HLS Laki-laki, HLS Perempuan, dan Total HLS di Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023
- 40 : Gambar 3.4 Perkembangan RLS Laki-laki, RLS Perempuan, dan Total RLS di Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023
- 41 : Gambar 3.5 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Laki-laki, Perempuan, dan Total Sulawesi Selatan (juta rupiah), 2020–2023
- 42 : Gambar 3.6 Grafik IPG Menurut Provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2023
- 44 : Gambar 3.7 Boxplot Dimensi IPG Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Daftar Gambar

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023

Volume 7, 2024

- 45 : Gambar 3.8 IPG Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023
- 51 : Gambar 4.1 Perkembangan IDG Sulawesi Selatan, 2010–2023
- 51 : Gambar 4.2 Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2010–2023
- 52 : Gambar 4.3 Perkembangan Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2010–2023
- 54 : Gambar 4.4 Perkembangan Sumbangan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2010–2023
- 55 : Gambar 4.5 Peta Tematik dan Grafik IDG Menurut Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan, 2023
- 56 : Gambar 4.6 Peta Tematik dan Grafik Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023
- 57 : Gambar 4.7 Peta Tematik dan Grafik Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023
- 57 : Gambar 4.8 Peta Tematik dan Grafik Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023

Daftar Lampiran

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SULAWESI SELATAN 2023
Volume 7, 2024

- 65 : Lampiran 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/
Kota di Sulawesi Selatan, 2023
- 66 : Lampiran 2 Komponen IPG Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi
Selatan, 2023
- 67 : Lampiran 3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/
Kota di Sulawesi Selatan dan Komponennya, 2023

<https://sulsel.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

<https://muisel.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Penduduk merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat menjadi pedang bermata dua, menjadi berkah jika pertumbuhan penduduk dibarengi dengan kualitas yang mumpuni, menjadi musibah jika pertumbuhan penduduk hanya sebatas kuantitas. Penduduk juga memegang peranan penting dalam pembangunan, integrasi penduduk dan pembangunan menjadi kajian penting.

Pada *International Conference on Population and Development* (ICPD) di Cairo pada 1994 yang dihadiri lebih dari 180 negara menghasilkan kesepakatan bahwa: integrasi antara penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan; pemberdayaan perempuan dan hak individu serta partisipasinya dalam pembangunan; setiap keluarga/pasangan berhak memiliki kehidupan kesehatan reproduksi yang baik, termasuk di dalamnya Keluarga Berencana; dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar, termasuk di dalamnya kesehatan ibu dan anak serta penanggulangan virus HIV/AIDS.

Proses pembangunan dan kependudukan merupakan suatu proses yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kedua proses ini terjadi secara terus menerus membentuk suatu siklus pembangunan. Karena pada prinsipnya, pembangunan adalah suatu proses tanpa akhir, terus berkembang menuju kearah yang lebih baik. *Framework* pembangunan dan hubungan antara kependudukan dengan pembangunan ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 *Framework* Pembangunan

Pada dekade sebelum Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja, sehingga pembangunan pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar dapat dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal tersebut penting karena dapat direfleksikan dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dengan demikian bahwa penduduk merupakan tujuan akhir dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia tersebut terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan :

1. **Produktivitas**, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
2. **Pemerataan**, masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
3. **Kesinambungan**, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.
4. **Pemberdayaan**, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (HDR, 1995).

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat

untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Hubungan antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi berlangsung melalui dua jalur. Jalur **pertama**; melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Besarnya pengeluaran tersebut merupakan indikasi tentang komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur **kedua**, melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga, dalam hal ini besarnya dan komposisi untuk nutrisi keluarga, biaya pelayanan kesehatan, dan pendidikan anggota rumah tangga. Jembatan yang menghubungkan antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi adalah melalui penciptaan kesempatan kerja.

Upaya pembangunan manusia dalam peningkatan kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja akan mempengaruhi penciptaan output yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Selain itu, faktor kelembagaan, distribusi sumber daya dan modal sosial merupakan hal yang tidak kalah penting.

Penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dilakukan oleh pemerintah ditempuh secara makro melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pengendalian inflasi, menekan tingkat pengangguran, dan memberikan kredit modal pada usaha kecil mikro dan menengah.

Hingga saat ini, masih relatif sedikit indikator statistik yang merupakan proksi untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI), yang merupakan pendekatan untuk mengukur pencapaian pembangunan yang dititik beratkan pada kesejahteraan manusia. Sejak saat diperkenalkan oleh UNDP pada 1990, IPM menjadi pusat perhatian berbagai pihak, baik kalangan masyarakat umum, pemerintah, politikus maupun kalangan akademis. IPM menjadi populer karena cara perhitungannya yang sederhana, yaitu hanya merupakan rata-rata dari indikator kesehatan; pendidikan; dan pendapatan, tetapi nilai yang dihasilkan sangat berarti bagi pemerintah dalam menterjemahkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Jadi menurut indeks ini, pembangunan dikatakan berhasil jika memberikan dampak yang baik pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan tingkat daya beli masyarakat. Ukuran ini bersifat universal dan sangat humanis karena mencerminkan pencapaian harapan setiap orang dalam kehidupannya. Data yang diperoleh dari internet menunjukkan bahwa IPM lebih populer dibandingkan *Human Development Report* (HDR) dan *World Development Report* (WDR).

1.2 Konsep Pembangunan Gender

Gender merupakan serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin serta berbagai hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender mulai diperkenalkan oleh ilmuwan sosial. Konsep perbedaan pada maksud gender tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan, dapat merugikan kerugian baik pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, kesetaraan gender merupakan hak yang sewajarnya terjadi agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia dan melekat pada berbagai aspek, yaitu pemberdayaan, partisipasi, dan kerjasama, keamanan, keberlanjutan, dan kesetaraan, (Sen, 1989). Jika melihat komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir sama secara kuantitas. Jika terjadi kesetaraan gender dalam hal hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama, niscaya akan memperkuat kemampuan suatu wilayah untuk berkembang. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan SDGs yang ke-5, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Kesetaraan ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan, dan variabel sosial ekonomi lainnya, selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Searah dengan target SDGs, meski tidak dicantumkan secara khusus, pemerintah dalam program Nawacita juga turut mencanangkan beberapa kebijakan gender yang tersirat dalam 3 agenda Nawacita, diantaranya:

1. Cita ke-2 yaitu “Membuat Pemerintah selalu Hadir dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya”, kebijakan yang termaktub adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan manusia.
2. Cita ke-4, yaitu “Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”, kebijakannya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.
3. Cita ke-5, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Indonesia”, kebijakan terkait adalah peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi salah satu alat dalam melihat keberhasilan pemerintah dalam implementasi program-program yang telah dicanangkan terkait gender dalam nawacita maupun SDGs.

1.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sejarah Pengukuran pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak *United Nations Development Program* (UNDP) mengeluarkan laporan berkala yaitu *Human Development Report* (HDR) di tahun 1990 yang mencantumkan *Human Development Index* (HDI) atau IPM (BPS, 2015), lima tahun kemudian, UNDP memasukkan konsep HDI dengan kesetaraan gender (*Gender Equality*). Sejak tahun 1995 UNDP telah mengukur pembangunan berbasis gender. Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan gender dalam aspek pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang dihitung oleh BPS bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sejak tahun 2009. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM tetapi dipisahkan dalam porsi laki-laki dan perempuan. Adanya perubahan metodologi pengukuran GDI oleh UNDP di tahun 2010, menyebabkan penyesuaian pula di negara-negara yang melakukan penghitungan IPG. Pada tahun 2015, Indonesia merilis IPG metode baru dengan backcasting data hingga tahun 2010.

Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IPG

Dimensi (1)	Indikator (2)
Umur panjang dan sehat	Umur Harapan Hidup pada saat lahir (e_0), Laki-laki & Perempuan
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan 2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan

1.4 Variabel dalam Indeks Pembangunan Gender

Metodologi dan konsep penghitungan IPM dan IPG adalah sama, yang mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010. IPG merupakan penghitungan IPM yang dipisah secara laki-laki dan perempuan. Beberapa variabel yang telah disebutkan sebelumnya, dijabarkan secara umum sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup (UHH) Laki-Laki dan Perempuan

Umur harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy* (e_0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil proyeksi SP2010. Dasar penghitungan UHH adalah menggunakan Angka Kematian Bayi laki-laki dan perempuan atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dengan pola model *West Coale-demeny Trussell equations* dan proyeksi IMR.

Untuk menghitung UHH, data yang digunakan adalah data kematian 0 tahun dan kelahiran level provinsi dari hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Sedangkan untuk level kabupaten/kota, harus tersedia data selisih Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Anak Masih Hidup (AMH) dari hasil SP210 untuk kabupaten/kota dan provinsi. Selanjutnya, kematian 0 tahun untuk kabupaten/kota diperoleh dengan rumus:

$$Kematian0th_{kab} = \frac{M_{kab}(SP2020)}{M_{prov}} \times Kematian0th_{prov} (Pr\ proyeksi)$$
$$IMR_{kab} = \frac{Kematian0th_{kab}}{Kelahiran_{kab}}$$

Keterangan

$Kematian0th_{kab}$	= Kematian bayi 0 tahun Kabupaten/Kota
$\frac{M_{kab}(SP2020)}{M_{prov}}$	= Selisih ALH dan AMH Kabupaten/Kota hasil SP2010
M_{prov}	= Selisih ALH dan AMH Provinsi
$Kematian0th_{prov} (Pr\ proyeksi)$	= Kematian bayi 0 tahun Provinsi hasil proyeksi
IMR_{kab}	= Angka Kematian Bayi Kabupaten/Kota
$Kelahiran_{kab}$	= Jumlah Kelahiran Bayi di Kabupaten/Kota

Setelah diperoleh angka kematian 0 tahun untuk kabupaten/kota dengan menggunakan rumus diatas, selanjutnya dengan menggunakan program aplikasi Mortpack ditransformasi menjadi UHH. Atau secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IMR_{kab} \rightarrow e_{kab}^0$$

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki dan Perempuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan dalam menjalani pendidikan formal. Untuk nilai RLS, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

RLS digunakan pada IPM metode lama dan metode baru untuk mengukur

dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun keatas. Sedangkan pada IPM metode baru, cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Untuk menghitung RLS, menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selanjutnya, pada keterangan pendidikan diperlukan skor/konversi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Selain konversi pada ijazah terakhir yang dimiliki, untuk menghitung RLS perlu memperhatikan partisipasi sekolah untuk penduduk usai 25 tahun keatas. Walaupun diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun, penduduk baik laki-laki maupun perempuan telah menyelesaikan pendidikannya, tetapi masih ada kemungkinan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas dan masih sekolah. Sehingga

Tabel 1.2 Konversi Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Ijazah (1)	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun) (2)
Tidak Punya Ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

Tabel 1.3 Konversi Partisipasi Sekolah

Keterangan (1)	Lama Sekolah (2)
Masih bersekolah di SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir-1 Konversi ijazah terakhir + 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Ket.: karena di SUSENAS, kode kelas untuk yang sedang kuliah S2=6 dan kuliah S3=7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

untuk partisipasi sekolah dapat dilihat pada tabel 1.3.

Setelah menghitung lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun keatas berdasarkan aturan konversi diatas, selanjutnya RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RLS_{25+} = \frac{1}{n_{25+}} \sum_{i=25}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan

RLS_{25+} = Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 25 tahun keatas

$\text{lama sekolah penduduk}_i$ = Total lama sekolah penduduk usia ke i disuatu wilayah

n_{25+} = Jumlah Penduduk Usia 25 tahun ke atas

c. Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki Dan Perempuan

Angka harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Faktor koreksi untuk siswa yang sekolah di pesantren dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

$$\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{Jumlah santri sekolah}$$

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}}$$

Sedangkan nilai HLS dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

- FK = Faktor Koreksi Pesantren
 E_i^t = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t
 P_i^t = Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t
 i = Penduduk usia ($a, a+1, \dots, n$)

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Laki-Laki Dan Perempuan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita ini dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.



Gambar 1.2 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM

Pada IPM metode lama, untuk menghitung paritas daya beli hanya menggunakan 27 komoditas. Dimana share 27 komoditas tersebut terus menurun dari 37,52 % pada tahun 1996 menjadi 24,66 % pada tahun 2012. Sedangkan pada IPM metode baru, penghitungan paritas daya beli dipilih 96 komoditas yang memberikan *share* sebesar 73,63 persen.

Selanjutnya, teknis penghitungan pendapatan perkapita yang disesuaikan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari Susenas. Langkah Pertama, menghitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga. Langkah Kedua, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota. Langkah Ketiga, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan.

$$Y_i' = \frac{(\text{rata-rata pengeluaran per kapita per bulan}) \times 12}{1000}$$

2. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil). Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

Tabel 1.4 Komoditas Penyumbang Penghitungan Paritas Daya Beli

Kelompok (1)	Share Kelompok (2)	Terpilih	
		Share (3)	Jumlah Item (4)
Makanan	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	3,95	2,30	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan Susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan Lemak	1,79	1,75	3
Bahan Minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,40	3
Konsumsi Lainnya	1,00	0,61	1
Makanan dan Minuman Jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan Sirih	5,88	5,72	3
Non Makanan	52,71	33,81	30
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	20,58	15,74	10
Aneka Barang dan Jasa	18,79	13,50	12
Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala	3,76	3,35	4
Barang Tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, Pungutan, Asuransi	1,65	0,00	0
Keperluan, Pesta, Upacara/Kenduri	1,78	0,00	0
Total	100,00	73,63	96

$$Y_t^* = \frac{Y_t'}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y_t' = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

- Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP). Langkah Pertama, menghitung harga rata-rata komoditas terpilih. Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK. Rata-rata harga komoditas terpilih dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan

P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah

V_i = Total *value* (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah

Q_i = Total Kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Langkah Kedua, menghitung paritas daya beli dengan menggunakan Metode Rao. Atau secara matematik dirumuskan sebagai:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan

PPP_j = Paritas Daya Beli (PPP) Kabupaten/Kota ke- j

p_{ij} = Harga komoditas i di Kabupaten/Kota j

p_{ik} = Harga komoditas i di Kabupaten/Kota k

m = Jumlah komoditas

- Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Keterangan

Y_t^{**} = Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan

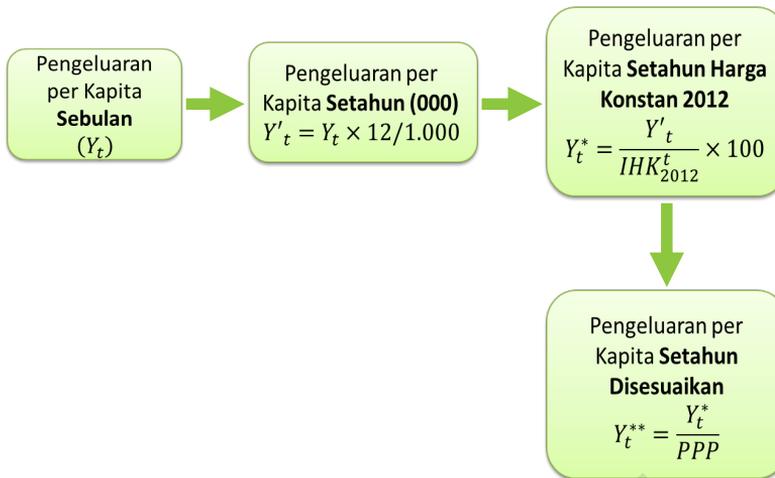
Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Indeks komposit pembentuk IPM meliputi:

a. Indeks Kesehatan Laki-Laki Dan Perempuan

Indeks Kesehatan dalam IPM dihitung dari Umur Harapan Hidup (UHH) laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, indeks kesehatan menyatakan seberapa persen capaian indikator kesehatan terhadap nilai maksimumnya. Nilai maksimum yang digunakan dalam indeks kesehatan adalah 85 tahun, mengacu pada nilai maksimum yang direkomendasikan oleh UNDP. Angka ini merupakan UHH tertinggi Negara Jepang.

Sedangkan nilai minimum UHH adalah 20 tahun seperti yang direkomendasikan



Gambar 1.3 Alur Perhitungan Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan

Beras	Pepaya	Rumah sendiri/bebas sewa
Tepung terigu	Minyak kelapa	Rumah kontrak
Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya	Rumah sewa
Kentang	Kelapa	Rumah dinas
Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir	Listrik
Kembung	Teh	Air PAM
Bandeng	Kopi	LPG
Mujair	Garam	Minyak tanah
Mas	Kecap	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Lele	Penyedap masakan/vetsin	Perlengkapan mandi
Ikan segar lainnya	Mie instan	Barang kecantikan
Daging sapi	Roti manis/roti lainnya	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Daging ayam ras	Kue kering	Sabun cuci
Daging ayam kampung	Kue basah	Biaya RS Pemerintah
Telur ayam ras	Makanan gorengan	Biaya RS Swasta
Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak	Puskesmas/pustu
Susu bubuk	Nasi campur/rames	Praktek dokter/poliklinik
Susu bubuk bayi	Nasi goreng	SPP
Bayam	Nasi putih	Bensin
Kangkung	Lontong/ketupat sayur	Transportasi/pengangkutan umum
Kacang panjang	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Pos dan Telekomunikasi
Bawang merah	Sate/tongseng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Bawang putih	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi perempuan dewasa
Cabe merah	Makanan ringan anak	Pakaian jadi anak-anak
Cabe rawit	Ikang (goreng/bakar dll)	Alas kaki
Tahu	Ayam/daging (goreng dll)	Minyak Pelumas
Tempe	Makanan jadi lainnya	Meubelair
Jeruk	Air kemasan galon	Peralatan Rumah Tangga
Mangga	Minuman jadi lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Salak	Es lainnya	Alat-alat Dapur/Makan
Pisang ambon	Roko kretek filter	
Pisang raja	Rokok kretek tanpa filter	
Pisang lainnya	Rokok putih	

Gambar 1.4 Daftar Paket Komoditi Makanan dan NonMakanan yang dipergunakan dalam Perhitungan PPP untuk IPM Metode Baru

UNDP. Angka minimum 20 tahun ini juga merupakan UHH terendah. Berpedoman pada nilai minimum dan maksimum ini, indeks kesehatan dirumuskan sebagai:

$$I_{kesehatan} = \left(\frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{mak} - UHH_{min}} \right) \times 100$$

Keterangan

- $I_{kesehatan}$ = Indeks Kesehatan
- UHH = Umur Harapan Hidup
- UHH_{mak} = Nilai Maksimal untuk Umur Harapan Hidup
- UHH_{min} = Nilai Minimum untuk Umur Harapan Hidup

Dengan memasukkan angka minimum dan maksimum untuk UHH, maka rumus diatas dapat ditulis kembali menjadi:

$$I_{kesehatan} = \left(\frac{UHH - 20}{85 - 20} \right) \times 100 = \left(\frac{UHH - 20}{65} \right) \times 100$$

b. Indeks Pendidikan Laki-Laki Dan Perempuan

Dalam IPM metode baru, indeks pendidikan laki-laki dan perempuan diukur oleh dua indikator, yaitu RLS dan HLS baik laki-laki maupun perempuan. Harapan lama sekolah (HLS) merupakan pendorong (*booster*) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS). Sehingga intervensi pemerintah sebaiknya diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah yang dampaknya akan meningkatkan HLS dan pada akhirnya akan meningkatkan RLS.

Indeks rata-rata lama sekolah, merupakan persentase capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas yang terbagi dalam laki-laki dan perempuan, dibandingkan nilai maksimumnya. Nilai maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun, sesuai dengan yang digunakan oleh UNDP. Indeks rata-rata lama sekolah dirumuskan sebagai:

$$I_{RLS} = \left(\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{mak} - RLS_{min}} \right) \times 100$$

Keterangan

- I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah
- RLS = Rata-rata lama sekolah
- RLS_{mak} = Nilai Maksimal untuk rata-rata lama sekolah
- RLS_{min} = Nilai Minimum untuk rata-rata lama sekolah

dengan memasukkan nilai maksimum dan minimum yang direkomendasikan oleh UNDP, maka rumus diatas menjadi

$$I_{RLS} = \left(\frac{RLS - 0}{15 - 0} \right) \times 100 = \left(\frac{RLS}{15} \right) \times 100$$

Selanjutnya, untuk indeks harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan merupakan persentase capaian harapan lama sekolah terhadap nilai maksimum (18 tahun). Angka 18 tahun mengacu pada nilai maksimum yang digunakan oleh UNDP. Jika kita telusuri secara seksama, nilai maksimum ini merupakan penjumlahan lama sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Indeks HLS dirumuskan sebagai berikut

$$I_{HLS} = \left(\frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \right) \times 100$$

Keterangan

- I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah
- HLS = Harapan lama sekolah
- HLS_{\max} = Nilai Maksimal untuk harapan lama sekolah
- HLS_{\min} = Nilai Minimum untuk harapan lama sekolah

dengan memasukkan nilai maksimum dan minimum yang direkomendasikan oleh UNDP, maka rumus diatas menjadi

$$I_{HLS} = \left(\frac{HLS - 0}{18 - 0} \right) \times 100 = \left(\frac{HLS}{18} \right) \times 100$$

Selanjutnya dari indeks RLS dan indeks HLS tersebut diintegrasikan menjadi indeks pendidikan. Pada awalnya, tahun 2010 indeks pendidikan menggunakan rata-rata geometrik. Tetapi untuk penyempurnaan, pada tahun 2014 dirubah metodenya menggunakan rata-rata aritmatik, yang dirumuskan sebagai berikut

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

Keterangan

- $I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan
- I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah
- I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

c. Indeks Pengeluaran Laki-Laki Dan Perempuan

Dibandingkan indeks yang lainnya, batas minimum dan maksimum untuk indeks pengeluaran tidak mengikuti rekomendasi UNDP. Batas maksimum dan minimum indeks pendapatan menggunakan satuan rupiah, bukan dollar seperti

yang digunakan oleh UNDP. Selain itu, acuan nilai minimum dan maksimumnya juga menggunakan batas nilai minimum dan maksimum kabupaten/kota di Indonesia. Batas nilai minimum adalah merupakan garis kemiskinan Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pada tahun 2010. Sedangkan batas maksimum pengeluaran per kapita disesuaikan adalah nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Indeks pengeluaran dirumuskan sebagai berikut:

$$I_{\text{pendapatan}} = \left(\frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})} \right) \times 100$$

Keterangan

- $I_{\text{pendapatan}}$ = Indeks Pendapatan
- Pendapatan = Pendapatan suatu daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Pendapatan_{\min} = Batas minimum untuk pendapatan
- Pendapatan_{\max} = Batas maksimum untuk pendapatan

Selanjutnya, dengan memasukkan batas minimum ($\ln(1.007,436)$) dan maksimum ($\ln(26.572,352)$) pada rumus diatas, diperoleh rumus sebagai berikut

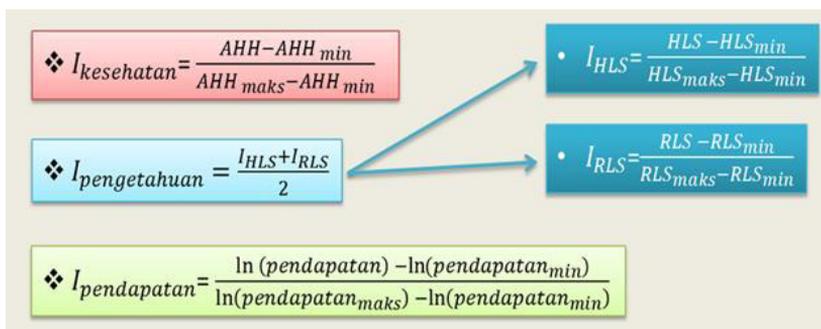
$$I_{\text{pendapatan}} = \left(\frac{\ln(\text{pendapatan}) - 6,92}{10,19 - 6,92} \right) \times 100$$

Penghitungan IPM Metode Baru

Berdasarkan berbagai uraian dan rumus yang telah dijabarkan diatas, maka IPM metode baru dirumuskan sebagai

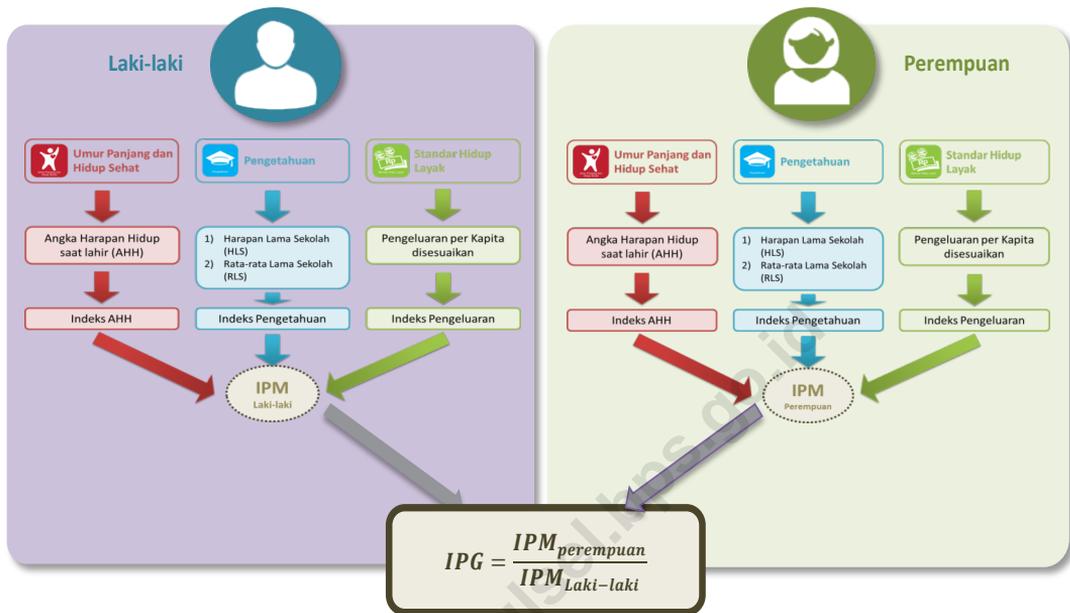
$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Secara ringkas, proses penghitungan indeks untuk IPM metode baru dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1.5 Rumus Perhitungan IPM Metode Baru

Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam pengukuran IPG, semua variabel pembentuk IPM yang telah disebutkan di hitung dalam laki-laki dan perempuan. Pengukuran IPM yang dipilah antara laki-laki dan perempuan, menghasilkan rasio yang disebut IPG.



Gambar 1.6 Gambaran Perhitungan IPM



BAB II

GENDER DALAM RANAH

MASYARAKAT

<https://pulsel.bps.go.id>

GENDER DALAM RANAH MASYARAKAT

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah dengan luas 46.717,48 km² dengan persentase terhadap keseluruhan luas wilayah Indonesia adalah sebesar 2,44 persen. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menaungi 24 daerah tingkat II dengan 21 wilayah berstatus kabupaten dan 3 wilayah kota (Makassar, Palopo, dan Parepare). Kabupaten terakhir yang terbentuk adalah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Toraja.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang relatif lebih maju dibanding dengan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia sehingga terkenal dengan sebutan Pintu Gerbang Indonesia Timur. Sejak tahun 1960, pemerintah telah memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dalam periode 1960 hingga sekarang sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian, predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial namun tidak dipungkiri kecenderungan besarnya sumbangan sektor pertanian semakin menurun setiap tahunnya. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa.



Gambar 2.1 Peta Sulawesi Selatan

2.1 Kependudukan

Penduduk dikonotasikan sebagai orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, wilayah atau negeri, dan merupakan aset pembangunan atau sering disebut sumber daya manusia.

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2023 berdasarkan hasil proyeksi adalah 9,36 juta jiwa. Pada 2023, rasio ketergantungan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 44,88. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 98,73. Artinya terdapat 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

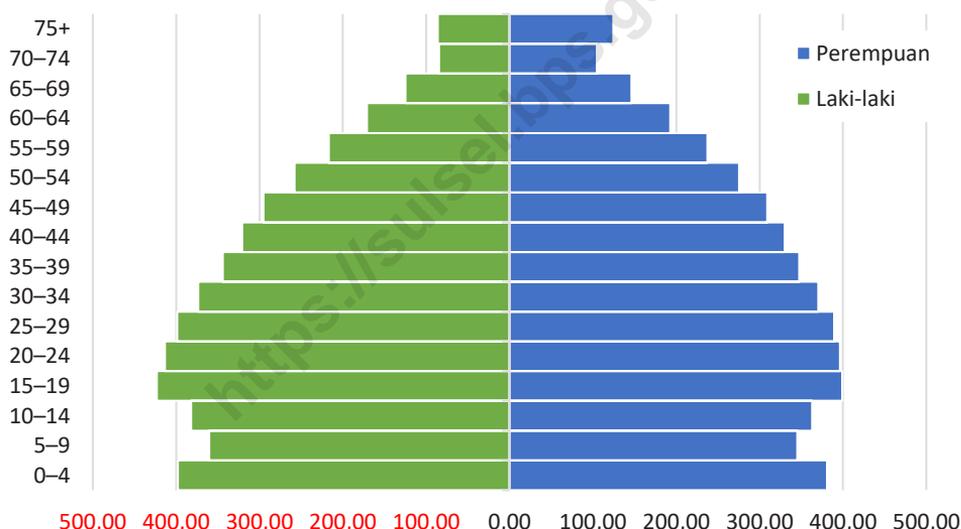
Tabel 2.1 Statistik Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (orang)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	Angka Beban Ketergantungan (persen)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Selayar	141.176	122	44,40	96,60
Bulukumba	450.325	383	42,63	95,45
Bantaeng	203.141	520	40,93	97,75
Jeneponto	414.482	521	43,51	98,00
Takalar	312.811	563	46,59	95,87
Gowa	801.108	442	44,01	98,46
Sinjai	267.536	309	44,43	98,24
Maros	407.923	283	45,94	100,83
Pangkep	355.613	400	45,95	96,46
Barru	187.952	156	47,61	96,07
Bone	823.079	180	45,50	95,76
Soppeng	238.239	172	46,08	93,60
Wajo	386.537	148	44,49	94,70
Sidrap	327.919	179	46,35	98,14
Pinrang	419.338	221	46,31	97,86
Enrekang	234.571	130	46,00	103,32
Luwu	379.295	131	46,00	101,92
Tana Toraja	289.451	142	44,25	106,89
Luwu Utara	333.781	45	43,59	101,78
Luwu Timur	308.532	46	47,11	105,28
Toraja Utara	273.337	212	53,15	104,14
Makassar	1.454.956	8.227	42,72	99,16
Parepare	158.425	1.767	46,26	98,68
Palopo	192.763	705	44,21	100,69
Sulawesi Selatan	9.362.290	207	44,88	98,73

Sumber Data: sulsel.bps.go.id.

Sebanyak 15,54 persen atau 1,45 juta penduduk Sulawesi Selatan berada di Kota Makassar. Kota Makassar sekaligus menjadi daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.227 penduduk per km². Daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 141. 176 jiwa. Kepadatan penduduk terendah yaitu Luwu Utara dengan kepadatan 45 penduduk per km². Angka ketergantungan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berada pada kisaran angka 40 persen kecuali Toraja Utara yang mencapai 53,15 persen.

Jika melihat indikator rasio jenis kelamin, terdapat 8 kabupaten/kota yang memiliki rasio di atas 100 yaitu Maros, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan palopo. Sedangkan lainnya memiliki rasio di bawah 100. Artinya sebagian besar penduduk di Sulawesi Selatan memiliki jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.



Sumber Data : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2035 | Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 2.2 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan, 2023

Piramida penduduk merupakan komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafis yang digambarkan dalam bentuk piramida. Dominasi jumlah penduduk perempuan terhadap laki-laki merata pada semua kelompok umur. Semakin tinggi kelompok umur maka selisih antara penduduk perempuan dengan laki-laki semakin mengecil.

Besarnya komposisi jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki perlu dilihat sebagai potensi, mengingat peran penting perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Perempuan berperan sebagai pencetak generasi-generasi penerus. Untuk konteks ini, perlu perhatian serius khususnya terhadap kesehatan perempuan sebagai calon ibu.

Tidak kalah penting adalah peran perempuan dalam sisi produktivitas, yaitu sebagai penyumbang angkatan kerja. Dari komposisi penduduk, usia produktif penduduk, yaitu pada kelompok usia 15-64 tahun, di dominasi oleh kaum perempuan. Komposisi penduduk perempuan yang besar merupakan aset dan potensi wilayah. Namun jika perempuan tidak mampu berkarya secara produktif, baik untuk pribadi, keluarga maupun ranah masyarakat, maka justru akan menjadi beban bagi wilayah.

2.2 Bidang Kesehatan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Agar dapat mencapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh pangan (makanan dan air minum), sandang berupa pakaian, papan dalam bentuk perumahan/pemukiman yang layak dan siap huni, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan selain angka kesakitan, dan angka kematian bayi yang dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan kesehatan.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Disamping itu, setiap individu juga bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk.

Pada hakekatnya derajat kesehatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu komitmen intersektoral dengan menyertakan peran serta masyarakat dan swasta.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

Faktor biologis dan gaya hidup mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Daya tahan perempuan lebih baik dibanding laki-laki. Dari sejak masa di dalam kandungan hingga lahir, laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan. Dari segi kromosom, sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X yang mengandung sekitar 1100 gen, selain berperan penting dalam pengaturan hormone, kromosom X juga berperan dalam fungsi vital tubuh lainnya, sementara pada laki-laki yang memiliki kromosom Y hanya mengandung sekitar 100 gen.

Dilihat dari gaya hidup, kebiasaan hidup kurang sehat seperti merokok lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Disamping merokok, secara umum banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas diluar dibandingkan dengan perempuan. Padatnya aktivitas diluar ruangan juga mendatangkan berbagai macam resiko kesehatan dan keselamatan. Meski perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki, namun secara umum perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Kondisi ini terlihat dari data keluhan kesehatan. Persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Tabel 2.2 Indikator Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Sulawesi Selatan (persen), 2023

Indikator (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir	20,73	24,29	22,55
Angka Kesakitan	9,25	10,00	9,63
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan	30,29	32,68	31,60
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan	67,44	70,75	69,32
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir	2,98	5,14	4,09
Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan	85,59	89,06	87,82

Sumber Data: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan 2023

Rentannya perempuan terhadap sakit juga diperkuat dengan data angka kesakitan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Angka kesakitan menunjukkan kondisi kesehatan yang menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari. Adapun dari segi upaya dalam menangani keluhan kesehatan, sebanyak 32,68 persen perempuan pernah rawat jalan sedangkan laki-laki sebanyak 30,29 persen. Kemudian sebanyak 70,75 persen perempuan yang rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan sedangkan laki-laki sebanyak 67,44 persen. Dalam kurun waktu setahun terakhir perempuan lebih banyak yang pernah rawat inap yaitu sebesar 5,14 persen sedangkan laki-laki 2,98 persen.

Secara umum perempuan cenderung lebih mudah terkena sakit. Namun disisi lain ketika sakit, perempuan cenderung lebih baik dalam hal penanganan yaitu rawat inap serta menggunakan jaminan kesehatan.

Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi suatu keharusan.

Selain jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, derajat kesehatan penduduk tercermin dari persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau. Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat.

2.3 Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar penduduk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan. Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan yang tinggi merupakan unsur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi diharapkan akan berimplikasi kepada produktivitas yang tinggi pula, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Semakin bagus kualitas pendidikan, maka semakin berkurang kesenjangan gender.

Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan pendidikan melalui berbagai program, antara lain dengan meningkatkan pengadaan sarana/

prasarana pendidikan, program wajib belajar, beasiswa dan pemberian bantuan operasional sekolah serta beberapa program lainnya. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas.

a) Angka Partisipasi

Ada beberapa ukuran untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Secara umum tahun 2023, APS Sulawesi Selatan pada usia 7-12 tahun sebesar 99,48 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Sulawesi Selatan sedang mengikuti pendidikan. Secara gender, partisipasi perempuan usia 7-12 tahun melebihi laki-laki. Hal serupa terlihat pada APS usia 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19,23 tahun dimana APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki.

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan Menurut Daerah dan Jenis Kelamin (persen), 2023

Daerah	Jenis Kelamin	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)
Perkotaan	Laki-laki	99,31	91,99	76,15	47,46
	Perempuan	99,66	96,98	73,33	46,37
	Laki-laki+Perempuan	99,48	94,54	74,73	46,92
Perdesaan	Laki-laki	99,34	90,79	65,18	22,73
	Perempuan	99,65	93,27	69,44	33,20
	Laki-laki+Perempuan	99,49	92,06	67,23	27,91
Perkotaan + Perdesaan	Laki-laki	99,33	91,35	70,58	35,65
	Perempuan	99,65	95,01	71,44	40,15
	Laki-laki+Perempuan	99,49	93,22	71,00	37,89

Sumber Data: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan 2023

Jika melihat APS menurut daerah, APS di perkotaan lebih tinggi dibandingkan APS di perdesaan pada usia 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-23 tahun. APS di perdesaan jika dilihat secara gender, APS perempuan tampak lebih tinggi pada semua usia dibandingkan APS laki-laki. Kondisi berbeda di perkotaan, APS laki-laki lebih tinggi dibandingkan APS perempuan pada usia 16-18 tahun dan 19-23 tahun.

Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Pada tahun 2023, APM Sulawesi Selatan mencapai 98,41 persen pada jenjang SD, 77,98 persen pada jenjang SMP, 60,57 persen pada jenjang SMA, dan 30,41 persen pada jenjang perguruan tinggi. Seiring semakin tinggi jenjang pendidikan maka APM semakin menurun.

Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni Sulawesi Selatan Menurut Daerah dan Jenis Kelamin (persen), 2023

Daerah	Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)
Perkotaan	Laki-laki	98,31	80,93	66,04	39,77
	Perempuan	98,97	80,08	61,54	37,91
	Laki-laki+Perempuan	98,64	80,50	63,78	38,84
Perdesaan	Laki-laki	98,40	75,16	54,67	16,55
	Perempuan	98,02	76,34	60,19	25,69
	Laki-laki+Perempuan	98,22	75,76	57,33	21,07
Perkotaan + Perdesaan	Laki-laki	98,36	77,86	60,27	28,69
	Perempuan	98,45	78,09	60,88	32,14
	Laki-laki+Perempuan	98,41	77,98	60,57	30,41

Sumber Data: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan 2023

APM daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan pada semua jenjang pendidikan. Menurut gender, kondisi berbeda pada daerah perkotaan dan perdesaan. APM perempuan di perkotaan lebih rendah dibandingkan APM laki-laki pada semua jenjang pendidikan kecuali SD. Sedangkan di perdesaan, APM perempuan lebih tinggi dibandingkan APM laki-laki pada semua jenjang pendidikan kecuali SD. Hal ini memunculkan beragam asumsi mengapa demikian, salah satunya adalah laki-laki di perkotaan cenderung lebih berpendidikan dibandingkan di perdesaan. Di satu sisi fasilitas pendidikan di perkotaan cenderung lebih baik sehingga mendorong sebagian penduduk untuk merantau demi menempuh pendidikan.

Menurut World Bank (2012), ada tiga penjelasan utama yang dapat menjelaskan pencapaian pendidikan menurut gender di negara-negara Asia Timur dan Pasifik termasuk Indonesia. Pertama adalah kondisi ekonomi berperan karena ketika suatu rumah tangga miskin atau menghadapi masalah ekonomi, anggaran yang terbatas biasanya mendorong rumah tangga untuk cenderung berinvestasi dalam pendidikan anak laki-laki. Maka dari itu, kondisi ekonomi yang lebih baik

bisa menurunkan disparitas gender karena suatu rumah tangga tidak harus mengorbankan investasi pendidikan pada anak dengan jenis kelamin tertentu. Kedua adalah perbaikan akses dan fasilitas pendidikan menurunkan biaya pendidikan sehingga menguntungkan dalam hal pendidikan anak, apapun jenis kelaminnya. Ketiga adalah adanya kesempatan ekonomi yang lebih baik untuk perempuan dapat mendorong orang tua untuk berinvestasi dalam pendidikan anak perempuan. Ketiga faktor ini dapat menjelaskan mengapa angka partisipasi sekolah membaik dan juga mengapa masih ada beberapa indikator pendidikan yang masih memiliki disparitas gender yang besar.

b) Kemampuan Membaca dan Menulis

Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu penduduk dalam kemampuan dasarnya terhadap pengetahuan adalah tingkat kemampuan membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a-z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh huruf jawa, kanji, dll). Semakin tinggi kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis suatu wilayah, semakin terbuka akses pengetahuan penduduk wilayah tersebut. Tahun 2023, kemampuan membaca huruf latin penduduk usia lebih dari 15 tahun sebesar 93,08 persen dan usia 15-24 tahun sebesar 99,85 persen. Kondisi serupa terjadi pada kemampuan membaca dan menulis huruf arab dan lainnya bahwa usia 15-24 tahun lebih tinggi dibandingkan usia 15 tahun ke atas.

Tabel 2.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca Menulis dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2023

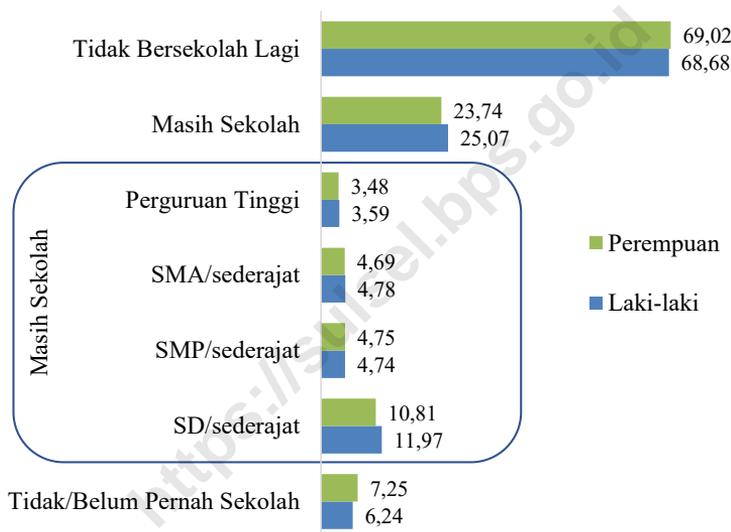
Kemampuan Membaca dan Menulis (1)	Jenis Kelamin (2)	> 15 tahun (3)	15-24 tahun (4)
Huruf Latin	Laki-laki	94,64	99,81
	Perempuan	91,63	99,88
	Laki-laki+Perempuan	93,08	99,85
Huruf Arab	Laki-laki	49,15	56,44
	Perempuan	20,06	59,49
	Laki-laki+Perempuan	49,62	57,96
Lainnya	Laki-laki	25,91	28,91
	Perempuan	26,50	30,72
	Laki-laki+Perempuan	26,22	29,81

Sumber Data: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan 2023

Jika melihat dari perspektif gender, tampak bahwa kemampuan membaca dan menulis perempuan tampak lebih tinggi pada usia 15-24 tahun pada huruf latin, huruf arab, dan lainnya. Sedangkan pada usia 15 tahun ke atas tampak bahwa

kemampuan membaca dan menulis laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tentu menjadi berita baik karena generasi penerus bangsa yang perempuan memiliki kemampuan lebih baik dalam hal membaca dan menulis.

Dalam mencapai tujuan pembangunan salah jalan paling utama adalah pendidikan. Semakin banyak laki-laki maupun perempuan yang berpendidikan akan berdampak pada kemajuan suatu daerah dan bangsa. Tahun 2023 tercatat masih terdapat 6,24 persen laki-laki dan 7,25 persen perempuan tidak/belum pernah sekolah. Adapun yang bersekolah tercatat sebesar 25,07 persen laki-laki dan 23,74 persen perempuan masih bersekolah dan paling banyak pada jenjang SD/ sederajat. Terakhir yang sudah tidak bersekolah tercatat sebesar 69,02 persen perempuan dan 68,68 persen laki-laki.



Sumber Data: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan 2023

Gambar 2.3 Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2023

Terakhir terkait pendidikan dan gender, terdapat isu yang penting yaitu gender menimbulkan preferensi jenis pendidikan yang pada akhirnya memengaruhi bidang pekerjaan yang akan digeluti. Penghasilan yang akan diperoleh pun menjadi cerminan dari bidang pekerjaan yang digeluti. World Bank (2012) menunjukkan bahwa di berbagai negara termasuk Indonesia, bidang studi teknik dan hukum didominasi oleh laki-laki, sedangkan bidang studi pendidikan, kesehatan, dan administrasi didominasi oleh perempuan.

2.4 Ketenagakerjaan

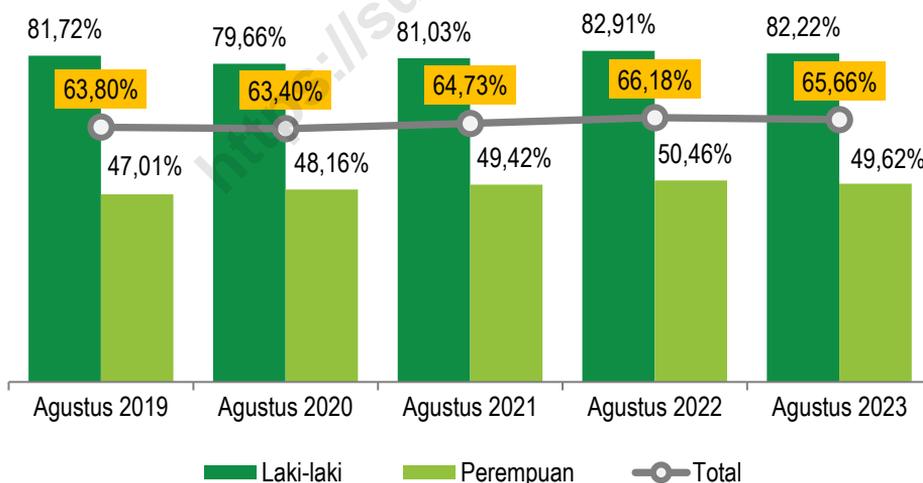
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Akhir-akhir ini topik mengenai masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi

baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan suatu hal penting. Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Sumber data yang dipergunakan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data angkatan kerja juga dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), namun karena data Sakernas lebih spesifik sehingga dalam bahasan ini akan digunakan data Sakernas.

Indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja serta elastisitasnya.

a) Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka ini perlu dicermati, karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.



Sumber Data: sulse.lbps.go.id.

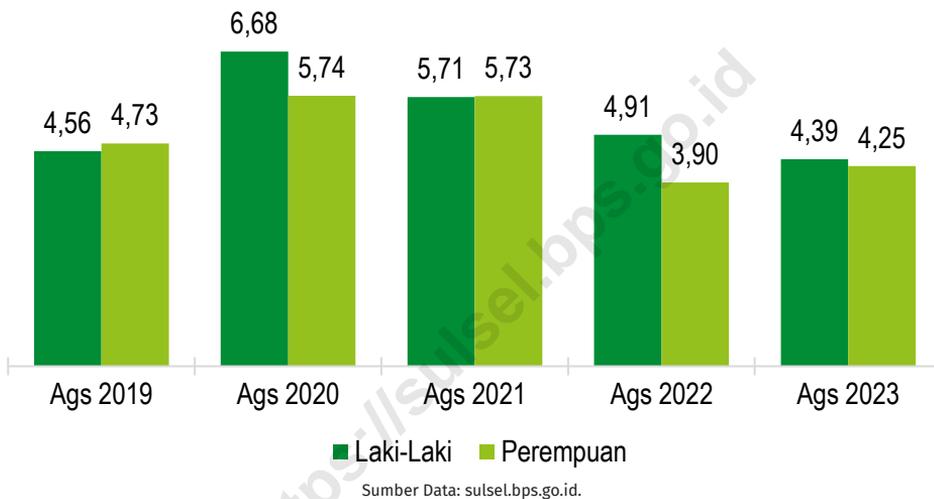
Gambar 2.4 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2019–2023

Dalam ranah gender, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Secara total, pada periode Agustus 2023, persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 65,66 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Secara gender, TPAK mencatat hanya sekitar 49,62 persen perempuan yang siap dalam dunia

kerja. Sementara laki-laki sudah mencapai sekitar 82,22 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laki-laki lebih mendominasi dunia kerja.

b) Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi semua penduduk yang masuk dalam angkatan kerja namun tidak punya pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Seiring dengan partisipasi angkatan kerja, TPT perempuan cenderung lebih rendah dibanding laki-laki. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup jauh perbedaannya, dimana laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan, persentase pengangguran juga lebih dominan laki-laki.

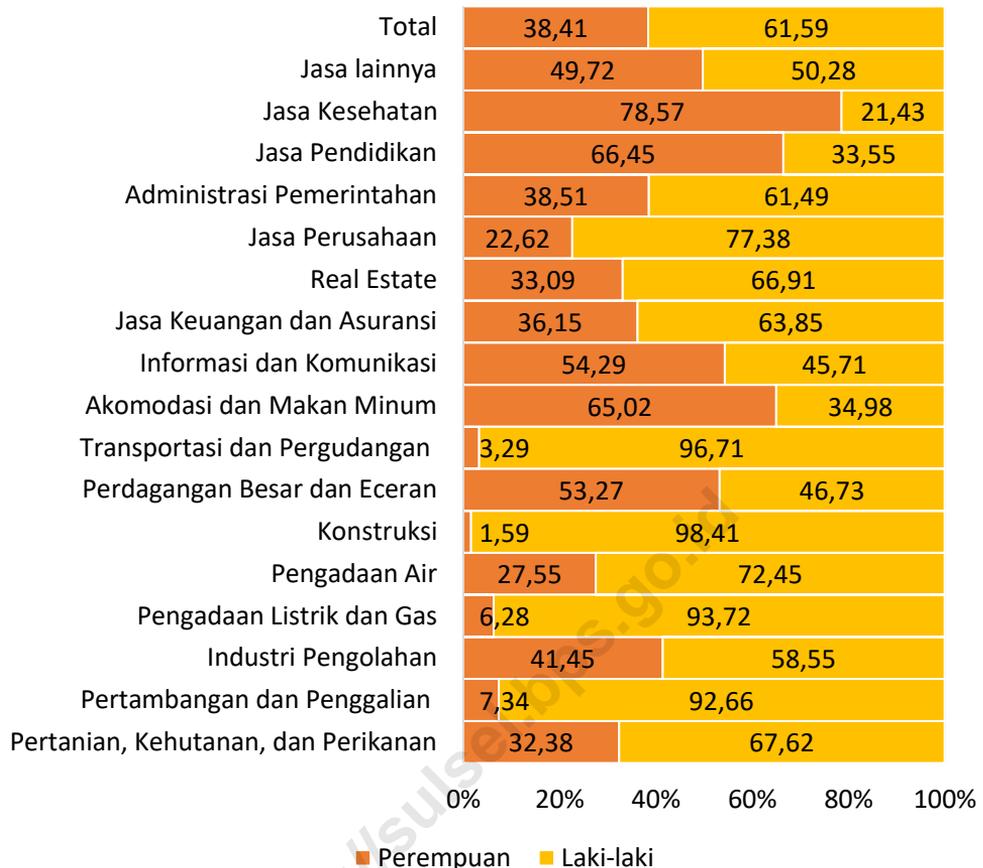


Gambar 2.5 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), 2019–2023

c) Kondisi Pekerjaan

Preferensi bidang pekerjaan pada perempuan cenderung pada sektor jasa sedangkan pada laki-laki cenderung pada pertanian dan manufaktur. Hal ini terlibat pada tabel berikut bahwa persentase pekerja perempuan pada lapangan pekerjaan tertinggi yaitu 78,57 persen. Lapangan pekerjaan dengan pekerja perempuan paling rendah adalah konstruksi hanya 1,59 persen.

Dari 38,41 persen pekerja perempuan, dominasi lapangan pekerjaan yang digeluti adalah jasa kesehatan, jasa pendidikan, akomodasi makan minum, informasi komunikasi, dan perdagangan. Sedangkan dari 61,59 persen pekerja laki-laki mereka menggeluti lapangan pekerjaan paling banyak di konstruksi, transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, dan pertambangan penggalan.



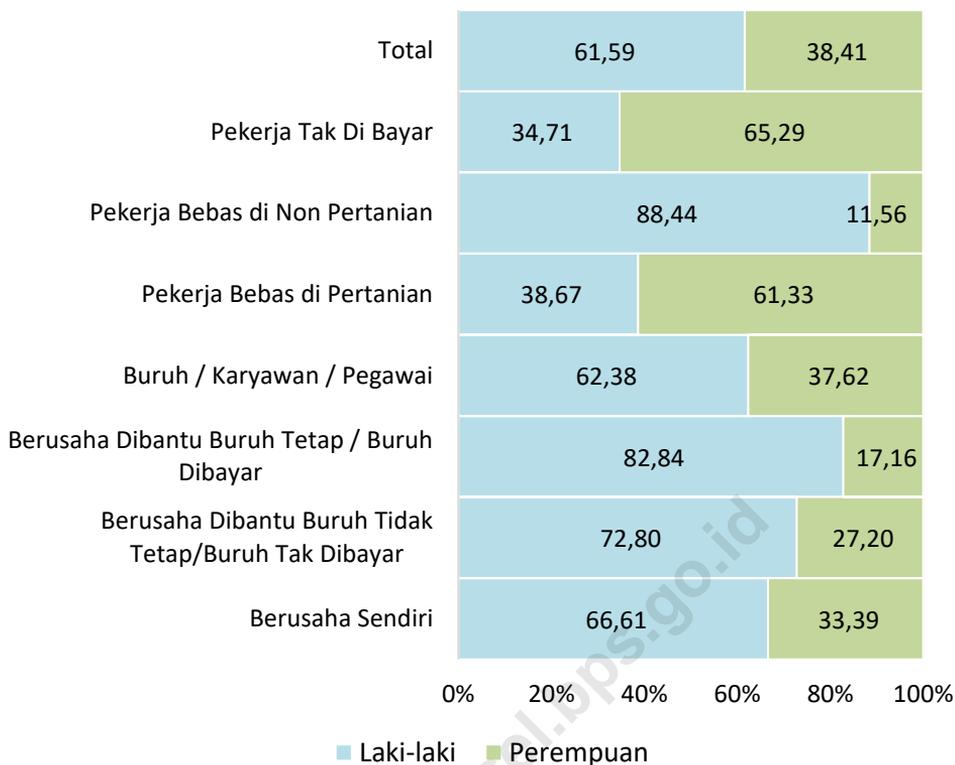
Sumber Data: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2023, BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.6 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (persen), 2023

Jika melihat status pekerjaan, ternyata perempuan lebih dominan pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar. Persentasenya cukup menonjol, dari sekitar 100 orang pekerja tak dibayar, 65 orang adalah perempuan. Sementara status pekerjaan lain yang bisa dikatakan menghasilkan pemasukan (status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh, karyawan, dan pekerja bebas di non pertanian), persentase laki-laki masih jauh mendominasi.

Dari jenis pekerjaan yang dilakukan, jenis tenaga professional, tenaga tata usaha jasa penjualan, dan tenaga usaha jasa, merupakan tiga jenis pekerjaan yang didominasi perempuan. Sementara tenaga kepemimpinan, tenaga tata usaha dan yang sejenis, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, serta tenaga produksi, operator alat dan pekerja kasar, didominasi laki-laki.

Durasi kerja antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Pekerja perempuan mendominasi dari sisi jam kerja 1 – 14 jam. Persentase pekerja perempuan paling kecil pada jam kerja sebesar 0 jam diikuti lebih dari 35 jam.



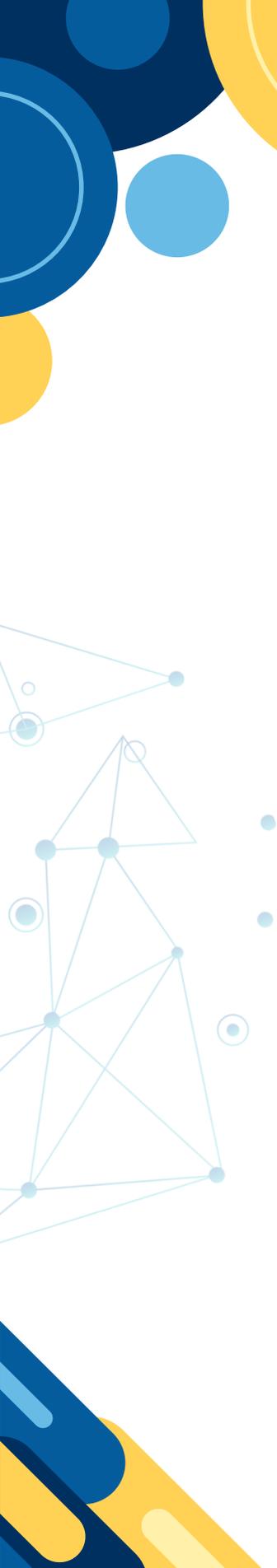
Sumber Data: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2023, BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 2.7 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2023

Tabel 2.6 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jam Kerja, dan Jenis Kelamin (persen), 2023

Penduduk Bekerja (1)	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)
Jenis Pekerjaan		
Tenaga Profesional	36,55	63,45
Tenaga Kepemimpinan	65,74	34,26
Tenaga Tata Usaha dan Yang Sejenis	52,95	47,05
Tenaga Tata Usaha Jasa Penjualan	40,13	59,87
Tenaga Usaha Jasa	49,95	50,05
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	67,60	32,40
Tenaga Produksi, Operator, Alat-alat, dan Pekerja Kasar	78,76	21,24
Jam Kerja Seminggu		
0 Jam	71,13	28,87
1 – 14 Jam	44,77	55,23
15 – 34 Jam	54,35	45,65
Lebih dari 35 Jam	67,77	32,23

Sumber Data: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2023, BPS Provinsi Sulawesi Selatan



BAB III
CAPAIAN
PEMBANGUNAN
GENDER SULAWESI
SELATAN

<https://sulis.bps.go.id>

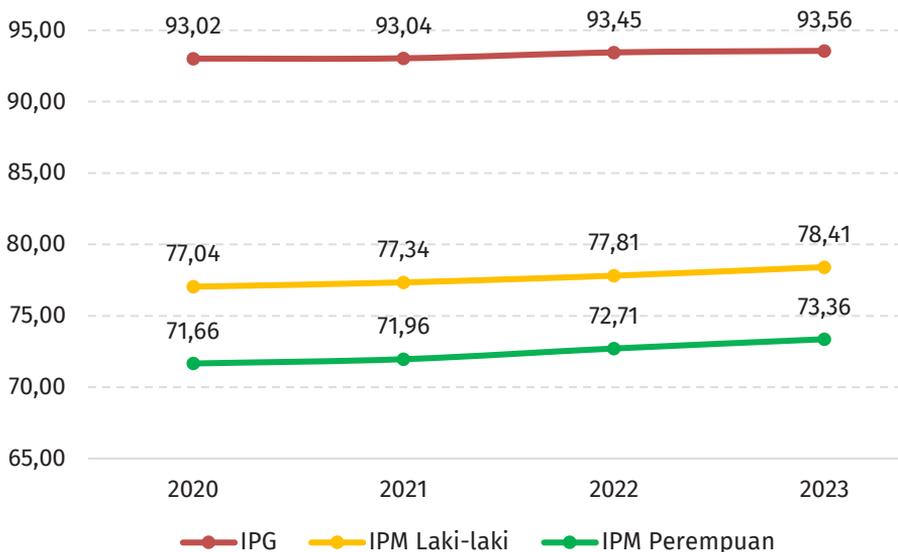
CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER SULAWESI SELATAN

3.1 Pembangunan Gender di Sulawesi Selatan

Istilah gender terkait dengan paradigma antara perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Di sebagian negara-negara yang di dominasi dengan budaya patriaki, perbedaan sering menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, serta kehidupan bermasyarakat. Untuk menghilangkan diskriminasi gender, diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Selatan tahun 2023 tercatat 93,56 meningkat dibanding tahun 2022 yang tercatat 93,45. Penjabarannya, IPM laki-laki di Sulawesi Selatan sebesar 78,41 dan perempuan sebesar 73,36. IPM laki-laki dan perempuan telah mencapai status tinggi (nilai di atas 70).



Sumber Data: sulsel.bps.go.id.

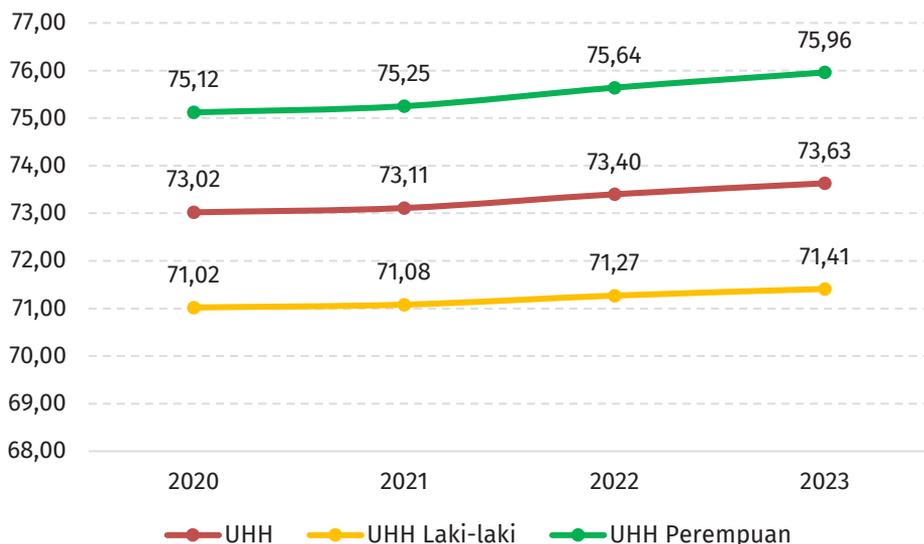
Gambar 3.1 Perkembangan IPG, IPM Laki-Laki, dan IPM Perempuan di Sulawesi Selatan, 2020–2023

Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Sulawesi Selatan masih berada di bawah angka 100. Namun jika melihat tren dari 2020 hingga 2023 terlihat adanya penurunan kesenjangan ditunjukkan dengan peningkatan IPG dari 93,02 tahun 2020 menjadi 93,56 tahun 2023.

Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun tren perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 0,59 persen, sementara perempuan 0,79 persen.

IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Beberapa studi ilmiah telah membuktikannya, mulai dari segi kromosom, hormonal hingga gaya hidup, perempuan cenderung lebih unggul. Hal inilah yang menyebabkan secara umum umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Pada tahun 2023 UHH perempuan di Sulawesi Selatan telah mencapai 75,96 tahun, sementara laki-laki mencapai 71,41 tahun.

Jika kita melihat tren pertumbuhan, UHH perempuan lebih cepat dibanding UHH laki-laki. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, UHH perempuan rata-rata tumbuh sebesar 0,37 persen sedangkan UHH laki-laki rata-rata tumbuh 0,18 persen. UHH baik laki-laki maupun perempuan terus tumbuh positif yang berarti kondisi kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan yang cenderung terus meningkat.



Sumber: sulsel.bps.go.id.

Gambar 3.2 Perkembangan UHH Laki-laki, UHH Perempuan, dan Total UHH di Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023

UHH yang terus meningkat menandakan akan adanya perubahan struktur penduduk. Di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan, telah mengalami penuaan penduduk yang menunjukkan dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia. Di satu pihak, penuaan penduduk mencerminkan keberhasilan pembangunan seperti perbaikan gizi, sanitasi, kemajuan teknologi medis, pelayanan kesehatan dan peningkatan pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan dan perpanjangan usia harapan hidup. Di lain pihak, penuaan penduduk menimbulkan tantangan yang harus disikapi, baik oleh lansia sendiri, keluarga, masyarakat, maupun oleh pemerintah. Tantangan utama adalah bagaimana mempertahankan kualitas hidup lansia karena menjadi tua umumnya diiringi dengan menurunnya kapasitas fisik. Menurunnya status kesehatan yang pada gilirannya menurunkan kapabilitas bekerja. Disamping itu, penuaan penduduk diiringi dengan meningkatnya penyakit degeneratif dan disabilitas yang meningkatkan kebutuhan untuk pendampingan dan perawatan jangka panjang terhadap lansia.

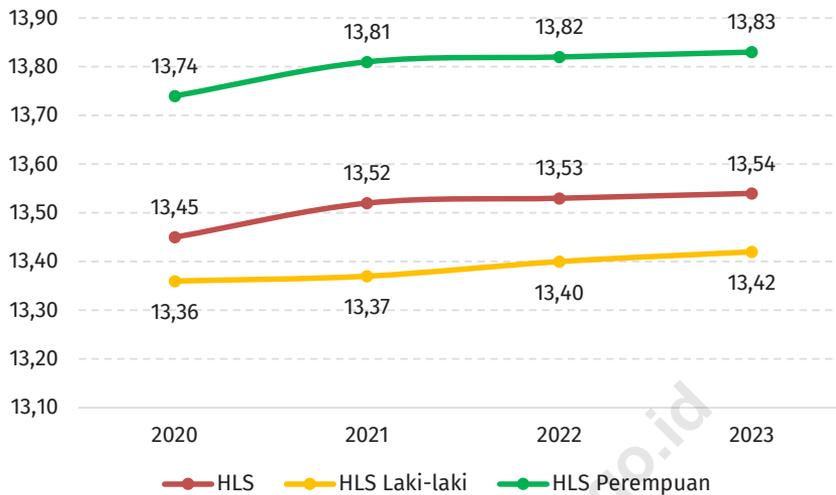
Berikutnya adalah dimensi pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah investasi sumber daya manusia yang tidak hanya menentukan kesuksesan seorang individu namun juga untuk menentukan kemajuan suatu bangsa. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah indikator kemajuan pendidikan suatu negara, semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Negara menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negaranya, yang termaktub dalam UUD 1945. Adapun kualitas pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan diwakili oleh harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

HLS mengukur peluang sekolah anak di masa mendatang, indikator ini diukur pada penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS juga merupakan pendorong (booster) untuk meningkatkan RLS. Secara agregat, HLS Sulawesi Selatan terus bertumbuh setiap tahunnya. Hingga tahun 2023, HLS Sulawesi Selatan telah mencapai 13,54 tahun, yang artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga ke jenjang diploma.

Sebagaimana usia harapan hidup, peluang bersekolah anak perempuan sedikit lebih baik dibanding laki-laki. Di tahun 2023, HLS perempuan tercatat 13,83 tahun, sementara laki-laki 13,42 tahun. Fenomena ini terkait dengan fakta data partisipasi sekolah pada tahun 2023, Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, pada dua jenjang dominan yaitu SD, SMP, dan SMA. Rendahnya peluang bersekolah laki-laki dibanding Perempuan juga terkait fenomena jumlah tenaga kerja anak laki-laki yang lebih tinggi

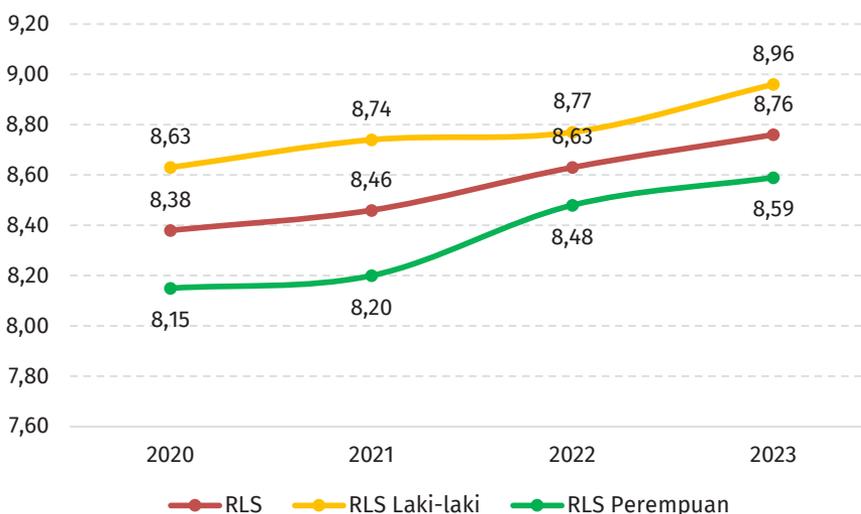
dibanding perempuan. Kondisi ekonomi memaksa pekerja anak untuk bekerja, yang berimbas pada anak putus sekolah.



Sumber: sulsel.bps.go.id.

Gambar 3.3 Perkembangan HLS Laki-laki, HLS Perempuan, dan Total HLS di Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023

Realita ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah tercatat dalam angka RLS. Berbeda dengan HLS, di tahun 2023, secara rata-rata laki-laki di Sulawesi Selatan sudah mampu mengenyam pendidikan hingga 8,96 tahun atau sekitar kelas 2-3 SMP, sementara perempuan sekitar 8,59 tahun. Meski demikian, secara rata-rata, dalam kurun 2020 hingga 2023 tren pertumbuhan RLS perempuan ternyata lebih cepat dibanding laki-laki. Rata-rata pertumbuhan RLS perempuan sekitar 1,78 persen, sementara laki-laki tumbuh sekitar 1,26 persen.



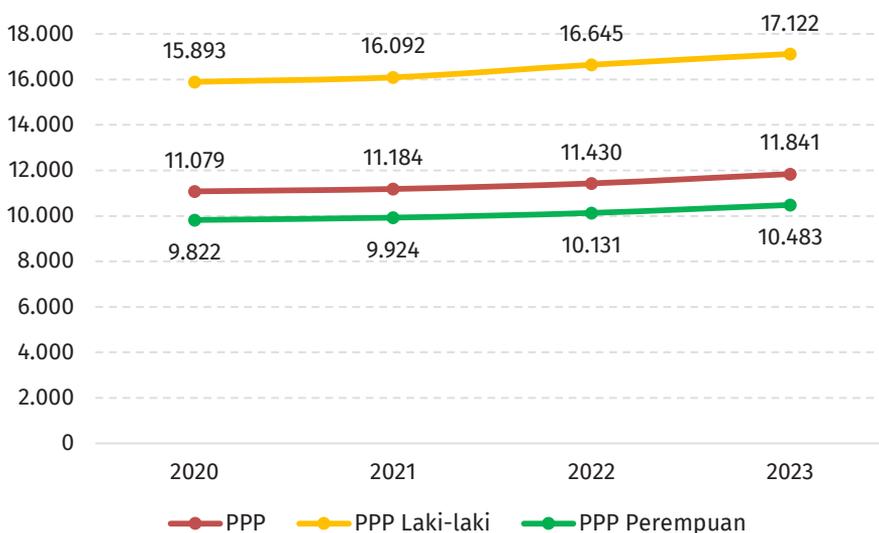
Sumber: sulsel.bps.go.id.

Gambar 3.4 Perkembangan RLS Laki-laki, RLS Perempuan, dan Total RLS di Sulawesi Selatan (tahun), 2020–2023

Ukuran capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi dilihat dari dimensi standar hidup layak, yang menjadi dimensi berikutnya dalam konteks penghitungan indikator IPG. Standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita disesuaikan. Tren pengeluaran perkapita disesuaikan Sulawesi Selatan secara agregasi terus bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan di kisaran angka 2,25 persen (periode 2020-2023). Tahun 2023, pengeluaran perkapita disesuaikan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan menjadi 17,84 juta rupiah.

Ditinjau secara terpisah menurut jenis kelamin dari tahun 2020 hingga 2023, pengeluaran perkapita yang disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Ternyata secara rata-rata pertumbuhan pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan juga lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini mengakibatkan kesenjangan PPP laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan semakin lebar. Tercatat di tahun 2023 pengeluaran perkapita disesuaikan laki-laki telah mencapai 17,12 juta rupiah, sementara perempuan sebesar 10,48 juta rupiah. Kondisi ini terkait fakta bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang memang lebih sedikit di banding laki-laki. Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.

Hingga tahun 2023 TPAK Sulawesi Selatan masih di dominasi oleh laki-laki dengan angka 82,22 persen, sementara perempuan sebesar 49,62 persen. Pengeluaran terkait dengan pendapatan, dan pendapatan terkait usaha atau kerja. Dengan melihat kondisi ketenagakerjaan laki-laki dan perempuan, wajar apabila pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki.



Sumber: sulsel.bps.go.id.

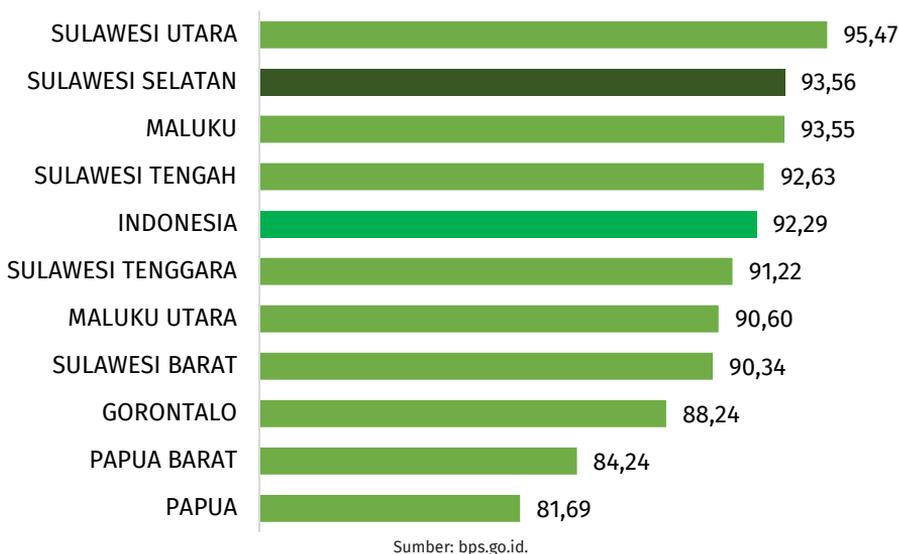
Gambar 3.5 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Laki-laki, Perempuan, dan Total Sulawesi Selatan (juta rupiah), 2020–2023

TPAK perempuan yang lebih rendah dapat dijelaskan antara lain oleh dua hal yaitu alokasi waktu dalam pekerjaan rumah tangga dan faktor siklus hidup seperti perkawinan dan melahirkan. Perempuan secara umum mengalokasikan waktu lebih banyak untuk pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, merawat anak dan keluarga dibanding laki-laki sehingga waktu perempuan di pasar kerja berkurang. Selain itu, biasanya perempuan keluar dari pasar kerja ketika menikah dan/atau melahirkan dan kemudian kembali ke pasar kerja atau tidak sama sekali setelah tahap kehidupan tersebut.

3.2 Posisi IPG Sulawesi Selatan di Indonesia

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda penting baik dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Melihat keterbandingan antar wilayah dapat menjadi evaluasi sejauh mana disparitas telah diminimalisir. Disamping itu, keterbandingan antar wilayah di Indonesia juga berperan penting dalam mengukur keberhasilan di wilayah masing-masing. Semakin rendah IPG suatu wilayah, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi antara pembangunan manusia perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2023, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPG tertinggi di Indonesia dengan angka IPG sebesar 96,40, sementara IPG terendah diduduki oleh Papua dengan angka 81,69. Capaian IPG Sulawesi Selatan cukup baik dengan nilai 93,56 dan berada di posisi ke 8 secara nasional dibawah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Angka IPG Sulawesi Selatan konsisten berada di atas angka Nasional.



Gambar 3.6 Grafik IPG Menurut Provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2023

Dalam lingkup wilayah Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua), IPG provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan ke 2 setelah Sulawesi Utara. Posisi ini tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2020 hingga 2023.

Tingginya usia penduduk perempuan terhadap laki-laki, merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam lingkup Sulampua, UHH perempuan Sulawesi Selatan ada di posisi kedua setelah Sulawesi Utara. Sementara pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) laki-laki Sulawesi Selatan mencapai 13,42 tahun dan menempati posisi ke lima dari sepuluh provinsi di Sulampua, sedangkan HLS terendah adalah Papua. HLS Perempuan Sulawesi Selatan menempati urutan keempat dengan capaian 13,83 tahun.

Rata-rata lama sekolah paling tinggi berada di Papua Barat untuk laki-laki dan Maluku untuk perempuan. RLS laki-laki Sulawesi Selatan menempati urutan 7 sedangkan RLS perempuan menempati urutan 6 dari 10 provinsi di Sulampua.

Pendapatan, yang dianalogikan dengan kemampuan daya beli perempuan Sulawesi Selatan menempati urutan ke dua setelah Sulawesi Utara. Sedangkan data beli laki-laki Sulawesi Selatan menempati urutan pertama. Kesenjangan dalam pengeluaran perkapita disesuaikan di Sulampua tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari nilai jangkauan yaitu selisih nilai tertinggi dengan terendah sebesar 5,8 juta rupiah untuk laki-laki dan 6,2 juta rupiah untuk perempuan.

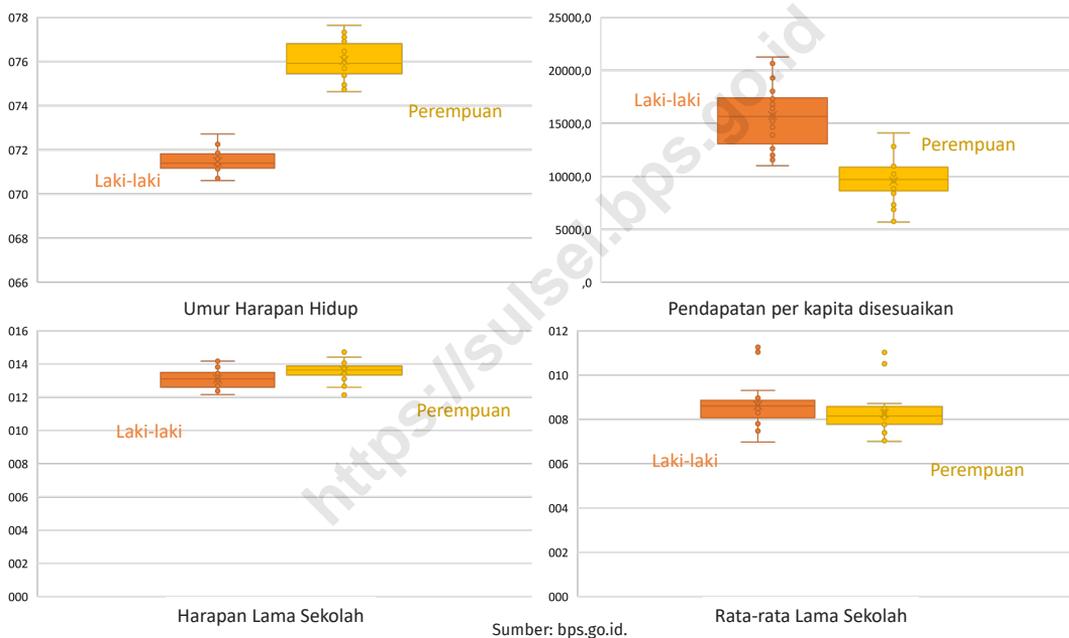
Tabel 3.1 UHH, HLS, RLS, dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Sulampua, 2023

PROVINSI	UHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		PPP (ribu rupiah/ tahun)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sulawesi Utara	71,56	76,26	12,79	13,33	9,70	9,85	15.946	10.537
Sulawesi Tengah	68,74	72,68	13,17	13,83	9,15	8,84	14.034	8.332
Sulawesi Selatan	71,41	75,96	13,42	13,83	8,96	8,59	17.122	10.483
Sulawesi Tenggara	69,84	73,83	13,67	13,98	9,61	9,01	14.426	8.178
Gorontalo	68,58	72,51	12,86	13,84	7,74	8,46	15.221	5.849
Sulawesi Barat	68,84	72,78	12,76	13,28	8,36	7,92	13.867	7.256
Maluku	68,53	72,46	13,87	14,39	10,31	10,14	12.533	8.088
Maluku Utara	68,84	72,78	13,75	13,74	9,52	9,01	13.274	7.500
Papua Barat	66,57	70,55	13,51	13,19	10,46	7,88	12.190	5.804
Papua	66,23	70,21	11,34	11,13	7,62	6,45	11.253	4.332
Indonesia	71,61	76,37	12,98	13,33	9,07	8,48	16.736	9.579

Sumber: bps.go.id.

3.3 Pembangunan Gender di Kabupaten/Kota

Pembangunan manusia berbasis gender kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Semua kabupaten/kota pada dasarnya punya semangat yang sama dalam upaya meningkatkan pembangunan manusianya berikut kesetaraan. Meski demikian, capaian pembangunan gender masih belum merata di wilayah Sulawesi Selatan. Nilai IPG kabupaten/kota berada pada range 88,10 hingga 98,43. Selama empat tahun berturut-turut (2020 – 2023), Sinjai menjadi kabupaten dengan nilai IPG tertinggi tahun 2020-2021 dan Enrekang menjadi kabupaten dengan nilai IPG tertinggi tahun 2022-2023. Takalar menjadi kabupaten/kota dengan nilai IPG terendah tahun 2021 hingga 2023.

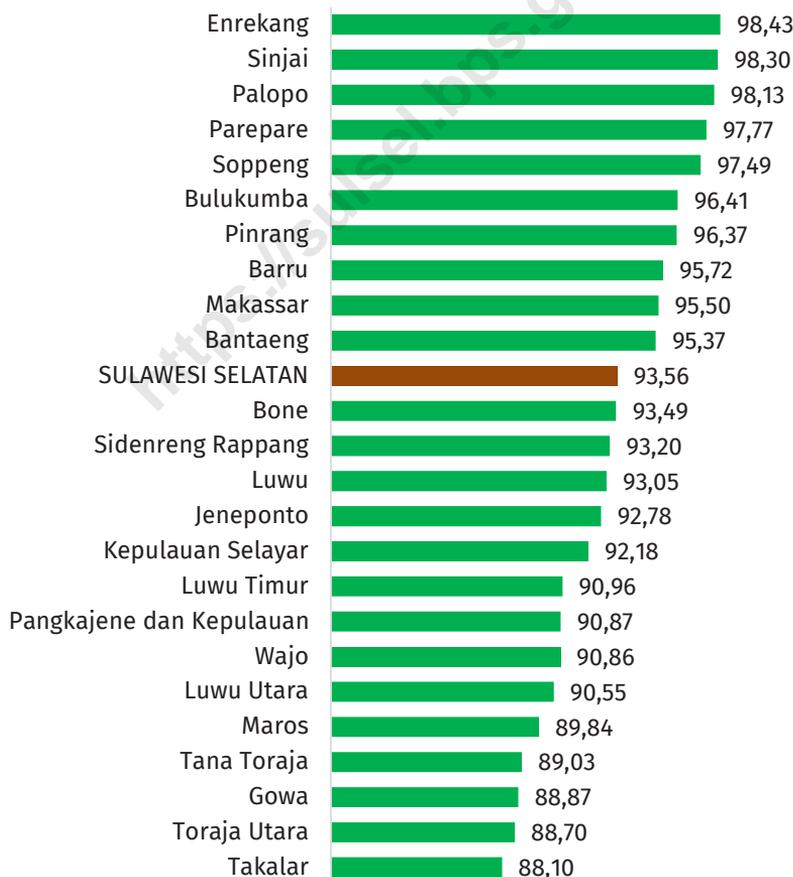


Gambar 3.7 Boxplot Dimensi IPG Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Kesenjangan capaian dimensi IPG terlihat pada Gambar 3.7. Terlihat bahwa capaian UHH perempuan selalu lebih tinggi dibanding UHH laki-laki pada semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dimensi pendidikan yang diwakili indikator HLS dan RLS tampak bahwa capaian HLS perempuan sedikit lebih baik dibanding HLS laki-laki. Berbeda dengan HLS, justru capaian RLS laki-laki tampak sedikit lebih baik dibanding RLS perempuan. Kesenjangan terlihat juga pada dimensi standar hidup layak. Capaian pendapatan per kapita disesuaikan laki-laki tampak lebih tinggi dibanding perempuan. Bahkan pendapatan perkapita disesuaikan pada laki-laki antar kabupaten/kota mengalami kesenjangan yang cukup besar, terlihat dari boxplot yang lebih lebar. Semakin lebar boxplot menunjukkan kesenjangan semakin lebar. Jika terdapat titik-titik di atas boxplot seperti yang

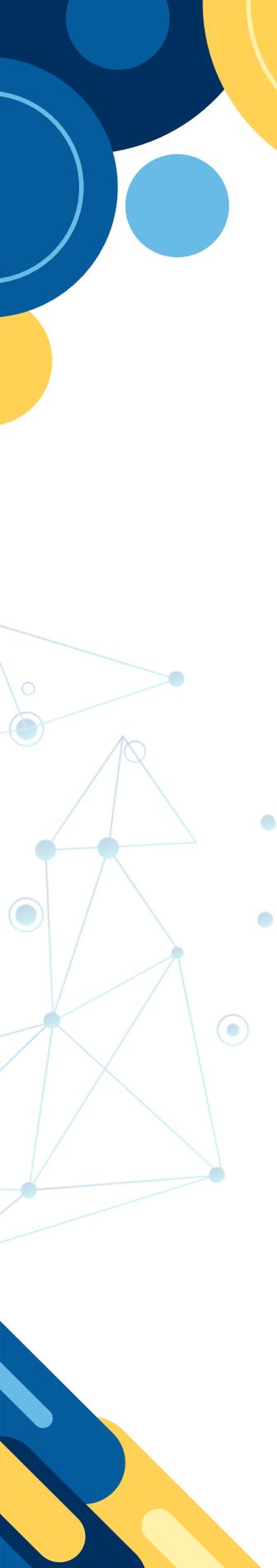
ditunjukkan pada boxplot HLS dan RLS, menunjukkan adanya nilai outlier pada data tersebut.

Sejatinya capaian IPM haruslah seiring dengan capaian IPG. Pembangunan yang dicanangkan tidak boleh menghiraukan aspek gender. Pembangunan yang inklusif adalah yang menciptakan kesetaraan gender. Kesetaraan gender berasal dari terjemahan dua kata yang berbeda yang kerap digunakan secara bergantian yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* mengacu kepada istilah yang berkenaan dengan pernyataan bahwa secara asasi, manusia diciptakan setara. *Equity* adalah konsep yang mengacu kepada perlakuan yang setara dan adil berdasarkan kebutuhan. Sebagai contoh, jika kita akan membagi sebuah kue kepada lima orang. Kita akan membagi kue bukan dibagi rata melainkan dibagi menurut kebutuhan kalori masing-masing individu sehingga kebutuhan tercukupi. Sebagai contoh lagi adalah penyediaan ruang menyusui pada fasilitas umum untuk ibu itu tidak *equal* melainkan *equity*.



Sumber: bps.go.id.

Gambar 3.8 IPG Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023



BAB IV
PEMBERDAYAAN
GENDER
SULAWESI SELATAN

PEMBERDAYAAN GENDER SULAWESI SELATAN

Pemberdayaan secara merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Inti dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan, dan kemampuan. Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam mengukur pemberdayaan diantaranya: partisipasi dalam pendidikan, dalam dunia kerja, serta partisipasi dalam jabatan publik.

Sistem patriarki yang mendominasi sebagian besar masyarakat menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa dibandingkan perempuan. Dominasi mencakup mulai dari ranah personal hingga lainnya. Secara historis, patriarki telah terwujud dalam sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi dalam berbagai budaya yang berbeda. Upaya pemberdayaan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender menjadi langkah penting proses modernisasi masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat.

4.1 Konsep Pemberdayaan Gender

Konsep pemberdayaan gender lebih mengacu pada proses terbukanya kesempatan yang setara ataupun sama. Sesuai dengan konsep UNDP (1995) yang memfokuskan makna pemberdayaan pada *opportunity*, bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran *well-being*. Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender dalam konsep pemberdayaan adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan ketenagakerjaan yang semakin kondusif kontribusinya terhadap perempuan, menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Titik beratnya adalah seberapa besar partisipasi perempuan, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Tabel 4.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IDG

Dimensi (1)	Indikator (2)
Keterwakilan di parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki-laki dan perempuan
Distribusi pendapatan	Upah buruh non pertanian; laki-laki dan perempuan

Sumber : www.bps.go.id

IDG diperoleh dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Jika IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi penduduk yang merata. Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG. Selanjutnya masing-masing indeks komponen dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

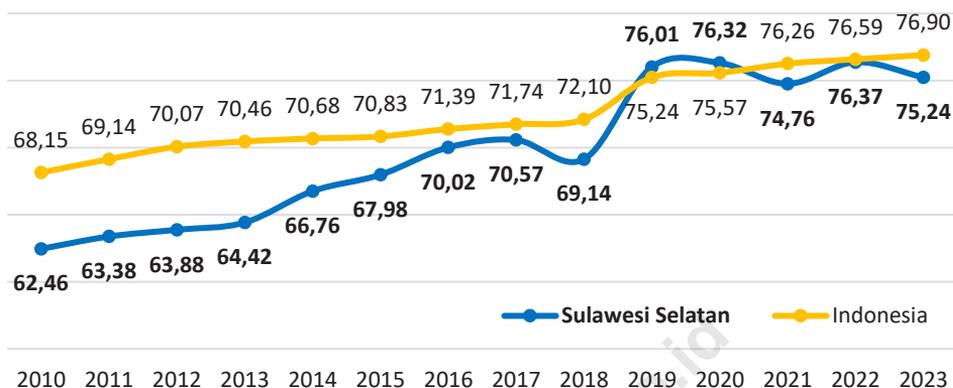
Indikator dalam IDG sebenarnya masih belum mencakup semua ranah kehidupan secara keseluruhan, seperti pada indikator parlemen, dianggap hanya relevan bagi negara maju. Kemudian pada indikator pengambilan keputusan hanya dilihat pada aspek ekonomi semata, padahal ketimpangan gender lebih banyak terjadi pada aspek non-ekonomi seperti pengambilan keputusan dalam rumah tangga (pemilihan menu makanan, pembelian alat-alat rumah tangga, pemeliharaan kesehatan anggota rumah tangga, dan pengaturan pembayaran sekolah).

Metode penghitungan IDG memang masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidakesetaraan Gender (IKG) bisa dihitung. Meski demikian, secara umum indeks pemberdayaan gender tetap dapat memperlihatkan capaian pemberdayaan secara gender yang ada di masyarakat.

4.2 IDG Sulawesi Selatan

Perkembangan IDG Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2018, 2021, dan 2023 yang mengalami penurunan. Angka IDG Sulawesi Selatan tahun 2023 mencapai 75,24, mengalami penurunan

dibanding tahun sebelumnya dan berada di bawah angka nasional (76,59). Penurunan IDG Sulawesi Selatan tahun 2023 disebabkan oleh penurunan keterlibatan perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan.



Sumber Data : bps.go.id

Gambar 4.1 Perkembangan IDG Sulawesi Selatan, 2010–2023

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

IDG dibangun oleh tiga dimensi, dimensi pertama yaitu indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Meskipun dunia politik di Indonesia masih di dominasi oleh kaum laki-laki, namun angka indeks keterwakilan perempuan di Sulawesi Selatan periode 2010 hingga 2017 terus mengalami kenaikan. Penurunan sempat terjadi di tahun 2018, dan naik kembali di tahun 2019 menjadi 27,71 persen. Tahun 2021 dan 2023 persentase keterlibatan perempuan di parlemen turun dibanding tahun sebelumnya.



Sumber Data : bps.go.id

Gambar 4.2 Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2010–2023

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD, menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Pada periode sekarang yaitu periode 2020-2024, jumlah legislator yang menduduki kursi anggota dewan kondisi Desember 2023 sebanyak 85 orang, dari jumlah tersebut, legislator perempuan hanya sejumlah 23 orang. Fakta ini memunculkan angka indeks keterwakilan perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2023 menjadi 25,88 persen.

Peranan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Budaya yang masih berkembang di Indonesia adalah pemahaman bahwa tanggung jawab perempuan adalah pada sektor rumah tangga atau sektor internal, sementara laki-laki pada sektor publik. Partisipasi perempuan di sektor formal perlu terus ditingkatkan, agar pemberdayaan perempuan semakin bergerak positif yang akan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Perkembangan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Sulawesi Selatan memang berfluktuasi, namun secara umum memiliki gambaran yang positif. Sejak 2011 hingga 2022, angka keterlibatan perempuan Sulawesi Selatan sudah berada diatas 50 persen. Di tahun 2023, angka indeks telah mencapai 55,03 persen, artinya tenaga profesional di Sulawesi Selatan yang berperan pula sebagai pengambil keputusan telah mengalami kesetaraan gender. Perempuan Sulawesi Selatan mampu mengejar ketertinggalan dari laki-laki dalam sektor publik. Angka persentase indikator tenaga manjer, profesional, administrasi, teknis untuk perempuan yang semakin meningkat, menyebabkan persentase indikator yang sama untuk laki-laki semakin menurun, menyebabkan ketidaksetaraan gender semakin berjarak. Fenomena ini justru turut menyumbang turunnya angka IDG secara umum.



Gambar 4.3 Perkembangan Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2010–2023

Profesionalisme perempuan yang semakin diperhitungkan di Sulawesi Selatan tercermin salah satunya dalam komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sulawesi Selatan. Komposisi PNS perempuan telah melebihi jumlah PNS laki-laki. Pada Desember 2023, proporsi PNS perempuan mencapai 55,40 persen.

Dari segi golongan, hampir 56,37 persen pegawai golongan IV berjenis kelamin perempuan. Golongan IV merupakan komposisi PNS terbanyak di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (46,97 persen) dari seluruh jenjang golongan.

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, Desember 2023

Golongan Kepangkatan (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
Golongan I	47	7	54
Golongan II	928	541	1.469
Golongan III	4.142	5.593	9.735
Golongan IV	4.351	5.622	9.973
Total	9.468	11.763	21.231

Sumber Data : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Dalam jenjang karir yang mengacu pada jabatan tertentu, Badan Kepegawaian Daerah mencatat, komposisi PNS perempuan banyak mendominasi pada jabatan JFU/pelaksana, JF Guru, JF Teknis, JF Medis, dan JF Dosen. Sementara laki-laki pada JFU/pelaksana, JF Guru, JF Teknis, JF Dosen, dan Pengawas.

Sementara dari segi pendidikan PNS, perempuan mendominasi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu mulai dari Diploma hingga S3. Pada tingkat pendidikan diploma I,II,III PNS perempuan sebesar 70,33 persen, tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lain.

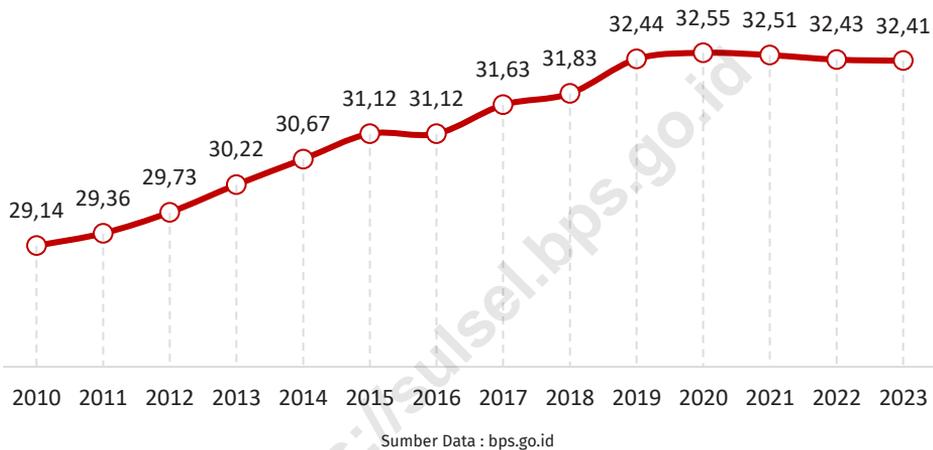
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, Desember 2023

Pendidikan (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
Sampai SD	39	8	47
SLTP/ sederajat	53	5	58
SLTA/ sederajat	1.114	551	1.665
Diploma I,II,III	292	692	984
Diploma IV / S1	5.933	8.332	14.265
S2/S3	2.037	2.175	4.212
Total	9.468	11.763	21.231

Sumber Data : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Posisi Perempuan dalam Distribusi Pendapatan

Kemampuan perempuan dalam penciptaan pendapatan di Sulawesi Selatan secara tren terus mengalami peningkatan. Meskipun capaiannya lebih rendah dalam berbagai indikator ekonomi dan tingkat partisipasi tenaga kerja, sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami peningkatan dalam periode 2010 hingga 2020. Namun di tahun 2022 hingga 2023, sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami penurunan. Tahun 2023 sumbangan pendapatan kerja perempuan sebesar 32,41 persen. Penurunan sumbangan pendapatan kerja perempuan menjadi penyumbang turunnya angka IDG secara umum Sulawesi Selatan tahun 2023.



Gambar 4.4 Perkembangan Sumbangan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2010–2023

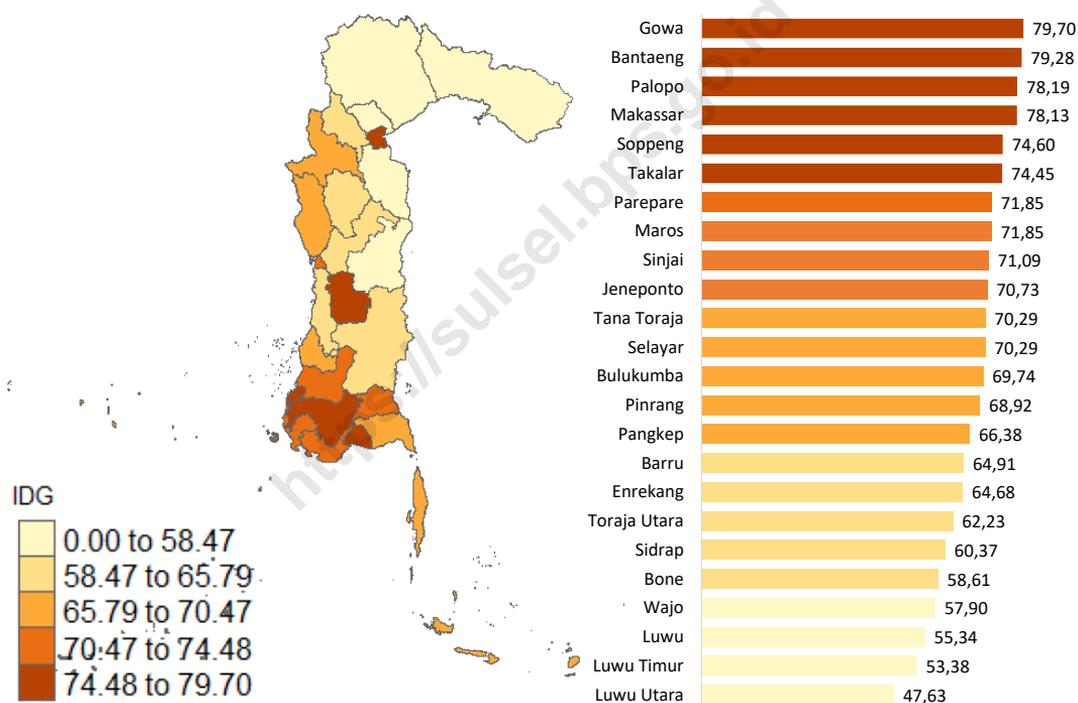
Sumbangan pendapatan perempuan yang cenderung stagnan pada kisaran angka 29 persen hingga 32 persen disebabkan belum ada perubahan struktur ketenagakerjaan perempuan. Salah satu isu utama dalam disparitas gender di bidang ketenagakerjaan adalah bagaimana kecenderungan perempuan dan laki-laki bekerja menurut status pekerjaan. Tampak bahwa satu-satunya status pekerjaan yang memiliki persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki adalah pekerja keluarga atau tidak dibayar yang perbedaannya hampir 5 kali lipat (Adieotomo, 2018).

Definisi pekerja keluarga/tidak dibayar menurut BPS adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Contohnya adalah anak petani yang membantu ayahnya bekerja di sawah atau keponakan seserang yang membantu menjaga warung. Menurut World Bank (2012), perempuan yang memiliki kecenderungan untuk menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar, jauh lebih tinggi dibanding laki-laki menunjukkan bahwa selain kegiatan pasar kerja perempuan berasosiasi kuat dengan perkawinan dan memiliki anak, serta alokasi perempuan di pasar kerja

ditentukan oleh kebutuhan usaha keluarga seperti suami atau keluarga lainnya. Karena pekerja tidak dibayar cenderung tidak memiliki pendapatan pribadi, maka mereka akan cenderung tidak memiliki kendali dalam alokasi sumber daya rumah tangga dari segi materi.

4.3. Capaian Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota

Pemberdayaan gender pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mempunyai angka yang bervariasi. Gowa merupakan kabupaten dengan IDG tertinggi sebesar 79,70, sementara itu Luwu Utara menjadi kabupaten dengan IDG terendah sebesar 47,63. Secara keseluruhan, hanya 4 kabupaten/kota yang berada di atas angka IDG Sulawesi Selatan.

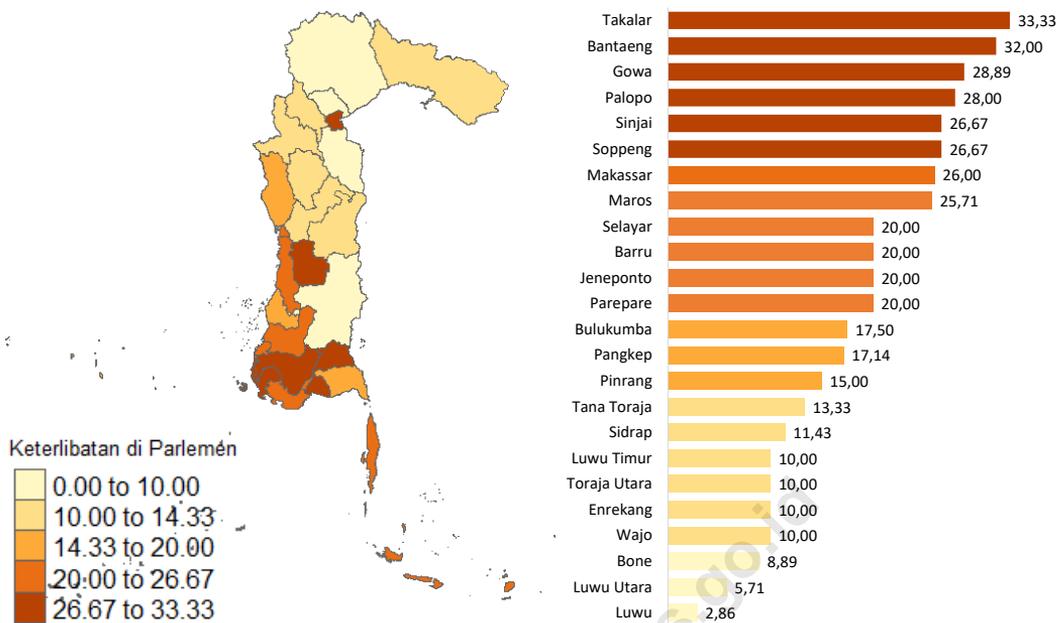


Sumber Data : bps.go.id

Gambar 4.5 Peta Tematik dan Grafik IDG Menurut Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan, 2023

Capaian IDG kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tidak lepas dari capaian tiap komponen pembentuknya. Perubahan masing-masing komponen mempengaruhi pergerakan IDG secara keseluruhan.

Keterlibatan perempuan dalam parlemen berpengaruh terhadap ketimpangan IDG. Kabupaten Gowa sebagai kabupaten dengan nilai IDG tertinggi, memiliki angka keterlibatan perempuan dalam parlemen yang tertinggi ketiga. Sedangkan Luwu Utara sebagai kabupaten dengan angka IDG terendah memiliki angka indeks keterlibatan perempuan dalam parlemen yang terendah kedua di Sulawesi Selatan dengan capaian 5,71 persen.

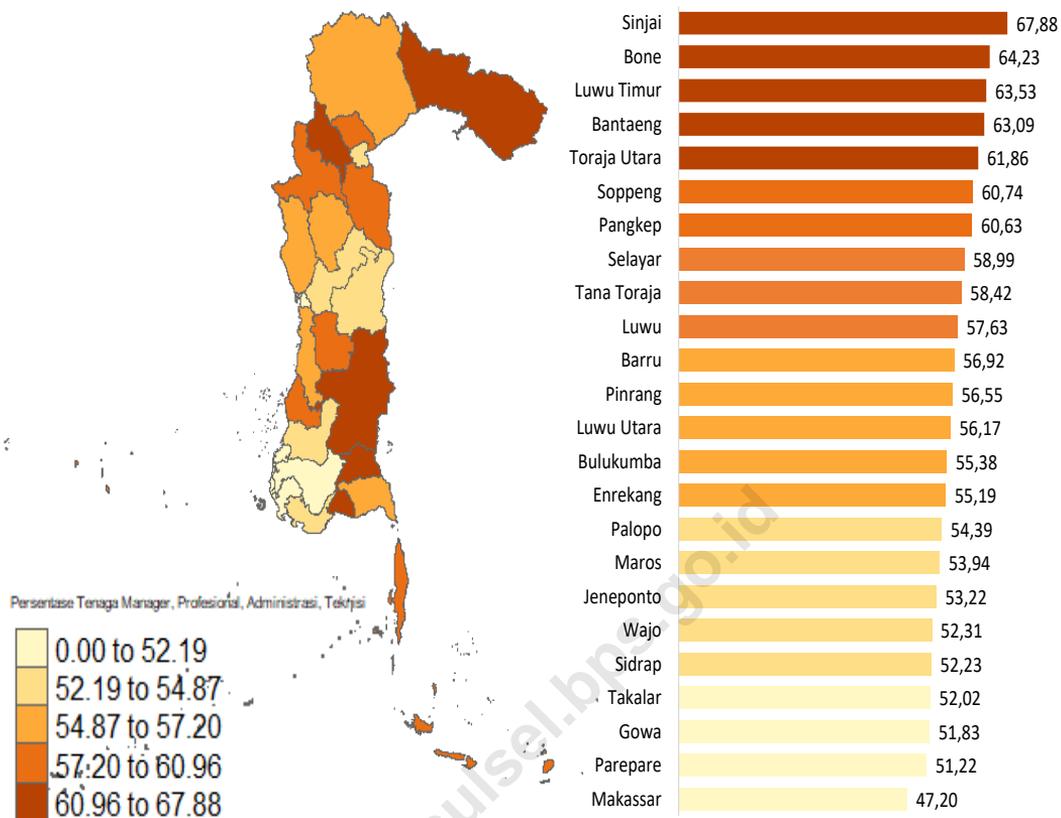


Sumber Data : bps.go.id

Gambar 4.6 Peta Tematik dan Grafik Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023

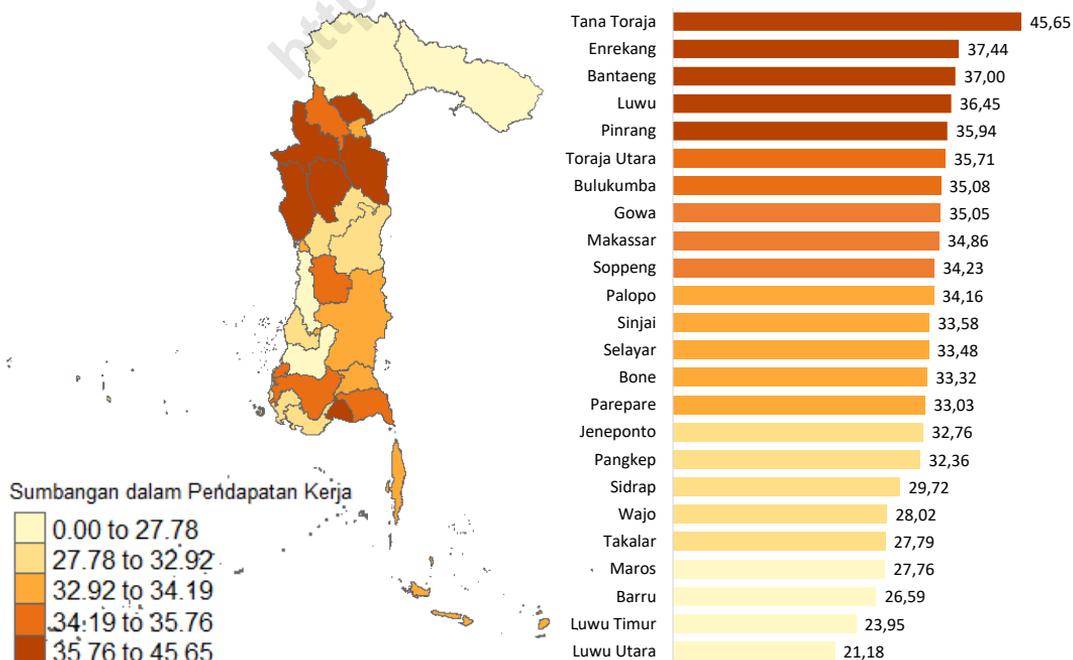
Keberdayaan perempuan sebagai tenaga profesional, tampaknya mulai merata di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki angka indeks perempuan sebagai pengambil keputusan atau tenaga profesional di atas rata-rata Sulawesi Selatan (sebanyak 15 kabupaten/kota). Sinjai menjadi kabupaten dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang tertinggi dengan capaian 67,88. Sementara Makassar menjadi wilayah di Sulawesi Selatan dengan angka indeks terendah dengan capaian 47,20 persen.

Peranan perempuan Sulawesi Selatan terhadap perekonomian, cukup merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan memiliki indeks sumbangan pendapatan di atas rata-rata Sulawesi Selatan (32,41 persen). Kabupaten Tana Toraja masih menjadi kabupaten dengan kemampuan indeks sumbangan pendapatan perempuan yang tertinggi dengan angka di atas 40 persen. Meski belum mencapai 50 persen, namun capaian sumbangan pendapatan perempuan di Tana Toraja ini telah melampaui rata-rata nasional. Sementara Luwu Utara, menjadi kabupaten dengan kontribusi pendapatan perempuan yang terendah di Sulawesi Selatan dengan capaian 21,18 persen.



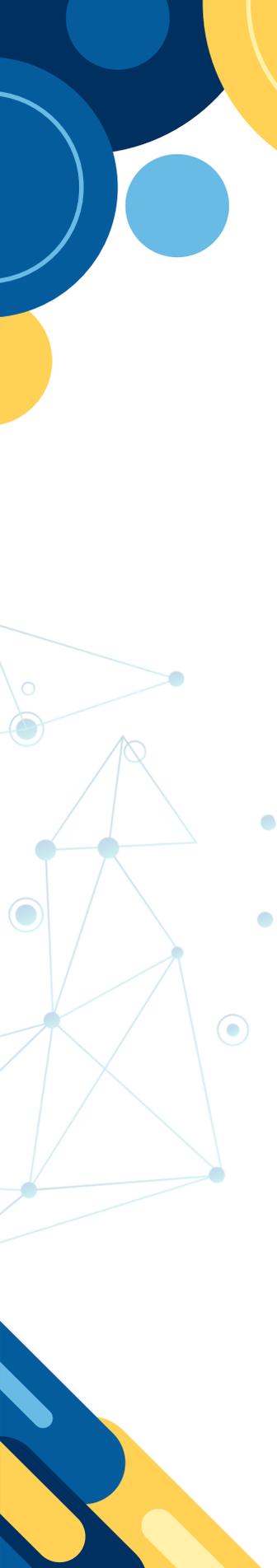
Sumber Data : bps.go.id

Gambar 4.7 Peta Tematik dan Grafik Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023



Sumber Data : bps.go.id

Gambar 4.8 Peta Tematik dan Grafik Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, 2023



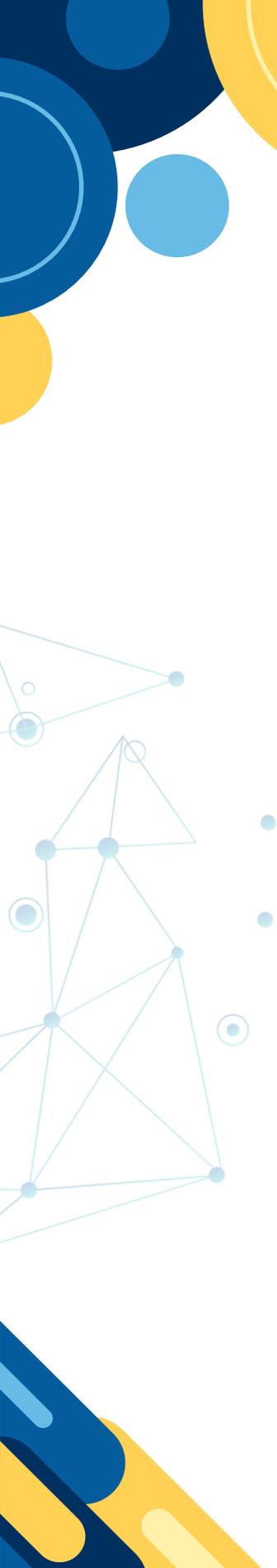
DAFTAR PUSTAKA

<https://sulselipps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M., & Pardede, E. L. (2018). *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Ketimpangan Gender 2022*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2023*. Makassar: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2023*. Makassar: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023*. Makassar: BPS.
- World Bank. (2012). *Toward Gender Equality in East Asia and the Pasific: A Companion to the World Development Report Overview*. Washington, DC: World Bank.



LAMPIRAN

<https://sulsesel.kps.go.id>



LAMPIRAN 1

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023

Provinsi/Kab/Kota	IPM		IPG
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Selayar	76,20	70,24	92,18
Bulukumba	76,13	73,40	96,41
Bantaeng	72,30	68,95	95,37
Jeneponto	73,08	67,80	92,78
Takalar	75,94	66,90	88,10
Gowa	77,39	68,78	88,87
Sinjai	72,27	71,04	98,30
Maros	78,34	70,38	89,84
Pangkajene dan Kepulauan	78,11	70,98	90,87
Barru	76,68	73,40	95,72
Bone	73,84	69,03	93,49
Soppeng	73,38	71,54	97,49
Wajo	78,01	70,88	90,86
Sidenreng Rappang	78,18	72,86	93,20
Pinrang	76,81	74,02	96,37
Enrekang	75,89	74,70	98,43
Luwu	76,66	71,33	93,05
Tana Toraja	75,54	67,25	89,03
Luwu Utara	76,73	69,48	90,55
Luwu Timur	79,89	72,67	90,96
Toraja Utara	75,28	66,77	88,70
Kota Makassar	86,75	82,85	95,50
Kota Parepare	81,90	80,07	97,77
Kota Palopo	81,97	80,44	98,13
Sulawesi Selatan	78,41	73,36	93,56

LAMPIRAN 2

Komponen IPG Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2023

Provinsi/Kab/Kota (1)	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu/Rupiah/Tahun)	
	L (2)	P (3)	L (4)	P (5)	L (6)	P (7)	L (8)	P (9)
Kepulauan Selayar	71,18	75,46	12,62	13,62	8,71	8,13	15.528	8.591
Bulukumba	71,66	76,48	13,12	13,62	8,49	8,13	14.643	11.101
Bantaeng	70,71	74,73	12,40	12,66	7,50	7,03	12.795	9.835
Jeneponto	71,53	76,20	12,15	12,12	6,97	7,00	14.940	8.788
Takalar	71,29	75,69	12,36	12,79	7,97	7,45	17.309	7.321
Gowa	71,68	76,50	13,49	14,11	8,61	8,25	15.758	6.884
Sinjai	70,87	74,90	13,08	13,86	7,98	7,76	11.001	9.667
Maros	71,36	75,84	13,42	13,63	8,57	7,82	18.021	8.864
Pangkajene dan Kepulauan	70,90	74,94	12,68	13,09	8,73	8,07	19.263	9.979
Barru	70,61	74,63	13,53	13,86	8,69	8,46	15.191	11.324
Bone	71,14	75,37	12,55	13,60	7,80	7,39	13.889	8.398
Soppeng	71,31	75,74	13,11	13,44	8,29	8,27	11.547	9.601
Wajo	71,17	75,44	13,25	13,69	7,47	7,13	21.260	10.209
Sidenreng Rappang	71,86	76,90	12,73	13,33	8,33	8,16	19.478	10.611
Pinrang	71,96	77,10	12,59	14,05	8,54	8,07	16.396	11.070
Enrekang	71,60	76,35	13,81	14,40	9,30	8,70	12.001	10.949
Luwu	71,20	75,50	13,03	13,80	8,86	8,61	15.221	8.845
Tana Toraja	72,72	77,32	13,88	14,18	8,83	8,51	11.588	5.750
Luwu Utara	71,37	75,87	12,58	12,59	8,29	7,94	17.428	8.876
Luwu Timur	71,87	76,90	12,80	13,42	9,15	8,68	20.635	9.719
Toraja Utara	72,25	77,64	13,10	13,72	8,75	8,49	12.620	5.679
Kota Makassar	72,47	77,96	15,56	16,11	11,77	11,29	21.564	14.229
Kota Parepare	71,94	77,06	14,17	14,71	11,03	10,50	16.899	14.093
Kota Palopo	71,66	76,46	14,16	15,84	11,25	11,01	16.818	12.809
Sulawesi Selatan	71,41	75,96	13,42	13,83	8,96	8,59	17.122	10.483

LAMPIRAN 3

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan Komponennya, 2023

Provinsi/Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persentase Perempuan		Sumbangan Dalam Pendapatan Kerja Perempuan	IDG
		Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi		
(1)	(%)	(%)	(%)	(4)	(5)
Kepulauan Selayar	20,00	58,99	33,48	70,29	
Bulukumba	17,50	55,38	35,08	69,74	
Bantaeng	32,00	63,09	37,00	79,28	
Jeneponto	20,00	53,22	32,76	70,73	
Takalar	33,33	52,02	27,79	74,45	
Gowa	28,89	51,83	35,05	79,70	
Sinjai	26,67	67,88	33,58	71,09	
Maros	25,71	53,94	27,76	71,85	
Pangkajene dan Kepulauan	17,14	60,63	32,36	66,38	
Barru	20,00	56,92	26,59	64,91	
Bone	8,89	64,23	33,32	58,61	
Soppeng	26,67	60,74	34,23	74,60	
Wajo	10,00	52,31	28,02	57,90	
Sidenreng Rappang	11,43	52,23	29,72	60,37	
Pinrang	15,00	56,55	35,94	68,92	
Enrekang	10,00	55,19	37,44	64,68	
Luwu	2,86	57,63	36,45	55,34	
Tana Toraja	13,33	58,42	45,65	70,29	
Luwu Utara	5,71	56,17	21,18	47,63	
Luwu Timur	10,00	63,53	23,95	53,38	
Toraja Utara	10,00	61,86	35,71	62,23	
Kota Makasar	26,00	47,20	34,86	78,13	
Kota Parepare	20,00	51,22	33,03	71,85	
Kota Palopo	28,00	54,39	34,16	78,19	
Sulawesi Selatan	25,88	55,03	32,41	75,24	

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

ST2023
SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>
E-mail: bps7300@bps.go.id